



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tegal.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025. Hasil dari Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi serta menyajikan pilihan penyelesaian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di masa datang.

Tegal, 10 Maret 2026

BUPATI TEGAL,



ISCHAK MAULANA ROHMAN, SH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB . I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah..... 1

B. Data Geografis Wilayah 2

C. Jumlah Penduduk 5

D. Jumlah Kecamatan 6

E. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Daerah 7

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 13

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 15

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah..... 15

B. Visi dan Misi Kepala Daerah 37

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 44

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan..... 46

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 46

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 54

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 54

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 57

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan 57

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 65

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 66

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 66

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 69

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya..... 72

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 76

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 78



F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	80
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	105
3.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ...	105
3.2 GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	105
3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	107
3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal	107
3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal	107
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .	108
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	108
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	108
4.1.2 Target Pencapaian.....	109
4.1.3 Realisasi	110
4.1.4 Alokasi Anggaran	113
4.1.5 Dukungan Personil.....	113
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	114
4.2. URUSAN KESEHATAN	115
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	115
4.2.2 Target	116
4.2.3 Realisasi	119
4.2.4 Alokasi Anggaran	132
4.2.5 Dukungan Personil.....	132
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	133
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM	136
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	136
4.3.2 Target Pencapaian.....	136
4.3.3 Realisasi	136
4.3.4 Alokasi Anggaran	140
4.3.5 Dukungan Personil.....	140
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	141
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	142
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	142
4.4.2 Target Pencapaian.....	143
4.4.3 Realisasi	143
4.4.4 Alokasi Anggaran	147
4.4.5 Dukungan Personil.....	147
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	148
4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN	



PERLINDUNGAN MASYARAKAT	149
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	149
4.5.2 Target Pencapaian.....	151
4.5.3 Realisasi	158
4.5.4 Alokasi Anggaran	168
4.5.5 Dukungan Personil.....	170
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	171
4.6. URUSAN SOSIAL	173
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	173
4.6.2 Target Pencapaian.....	174
4.6.3 Realisasi	175
4.6.4 Alokasi Anggaran	180
4.6.5 Dukungan Personil.....	180
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	181
4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	182
BAB V PENUTUP	221



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. Penjelasan Umum

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tegal sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; dan
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.



Sejarah Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Historis dan Aspek Yuridis Formal. Secara Historis, Kabupaten Tegal diakui sebagai bagian dari *Babad Tanah Jawa* dimulai dari diangkatnya Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung (setaraf dengan Tumenggung) di Kadipaten Tegal pada Hari Rabu Kliwon tanggal 18 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul Awal Tahun 1010 Hijriyah atau 1523 Caka. Kabupaten Tegal bila ditinjau aspek yuridis, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga dipandang perlu untuk memindahkan Pusat Ibu kota dari Kota Tegal ke Kota Slawi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, maka Ibukota Kabupaten Tegal yang sebelumnya di Kota Tegal pindah ke Kota Slawi. Perpindahan ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dilakukan sejak tahun 1981 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 15 Tahun 1981 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pemindahan Ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Tegal. Disamping itu guna pengembangan wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan secara umum, pengembangan wilayah dan perubahan ruang yang lebih menyebar dan meluas sebagai dampak Pembangunan bidang Pemerintahan, Perekonomian maupun Kemasyarakatan.

B. Data Geografis Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Tegal terletak antara 1080 57' 6" – 1090 21' 30" Bujur Timur dan 60 50' 41" - 70 15' 30" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tegal memiliki batas-batas:

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas



- Sebelah barat : Kabupaten Brebes
- Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan yang terdiri dari 281 Desa dan 6 Kelurahan.

Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km)
1.	Margasari	Margasari	100,8
2.	Bumijawa	Bumijawa	109,2
3.	Bojong	Bojong	67,7
4.	Balapulang	Balapulang	86,2
5.	Pagerbarang	Pagerbarang	45,8
6.	Lebaksiu	Lebaksiu Lor	47,0
7.	Jatinegara	Jatinegara	109,5
8.	Kedungbanteng	Kedungbanteng	82,7
9.	Pangkah	Pangkah	37,6
10.	Slawi	Slawi Wetan	13,8
11.	Dukuhwaru	Dukuhwaru	26,3
12.	Adiwerna	Adiwerna	27,0
13.	Dukuhturi	Dukuhturi	17,1
14.	Talang	Talang	18,9
15.	Tarub	Mindaka	28,0
16.	Kramat	Kramat	43,9
17.	Suradadi	Suradadi	58,8
18.	Warureja	Warureja	63,6
Jumlah			983,9

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2025

- Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:
- Daerah Pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja.
 - Daerah Dataran Rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
 - Daerah Dataran Tinggi/Pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

- 1. Slawi – Margasari: 23 km
- 2. Slawi – Bumijawa : 24 km
- 3. Slawi – Bojong : 20 km
- 4. Slawi – Balapulang : 12 km
- 5. Slawi – Pagerbarang : 14 km
- 6. Slawi – Lebaksiu Lor : 10 km
- 7. Slawi – Jatinegara : 18 km
- 8. Slawi – Kedungbanteng : 7 km
- 9. Slawi – Pangkah : 4 km
- 10. Slawi – Dukuhwaru : 5 km
- 11. Slawi – Adiwerna : 6 km
- 12. Slawi – Dukuhturi : 12 km
- 13. Slawi – Talang : 8 km
- 14. Slawi – Mindaka : 10 km
- 15. Slawi – Kramat : 23 km
- 16. Slawi – Suradadi : 30 km
- 17. Slawi – Warureja : 42 km

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan jumlah curah hujan sepanjang tahun 2024 sebesar 1.550,70 mm/tahun. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin dan suhu udara serta penguapan sedang–



sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 304,30 mm/bulan dengan rata-rata kelembapan 83,47 persen, rata-rata Tekanan Udara 1009,8 mbar, rata-rata kecepatan angin 2,15 knot dan Suhu udara rata-rata 28,30 OC.

C. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan data yang ada pada PPDKKD (Pengelolaan dan Pelayanan Data Kependudukan Kepada Daerah) dan PDAK (Pengelolaan Data Kependudukan) tahun 2025 semester 1 per tanggal 20 Februari 2026 jumlah penduduk Kabupaten Tegal adalah sebanyak 1.757.489 jiwa. Angka jumlah penduduk dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 jumlah pendudukan Kabupaten Tegal adalah sebanyak 1.761.471 jiwa. Struktur penduduk Kabupaten Tegal tahun 2025 sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TEGAL TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MARGASARI	62.095	60.113	122.208
2	BUMIJAWA	57.011	53.846	110.857
3	BOJONG	43.478	41.187	84.665
4	BALAPULANG	53.231	51.217	104.448
S 5	PAGERBARANG	34.484	33.845	68.329
u 6	LEBAKSIU	52.931	52.121	105.052
m 7	JATINEGARA	35.193	33.527	68.720
b 8	KEDUNGBANTENG	25.037	24.500	49.537
e 9	PANGKAH	63.241	61.235	124.476
r 10	SLAWI	42.346	42.159	84.505
11	ADIWERNA	73.531	70.036	143.567
12	TALANG	58.246	55.366	113.612
13	DUKUHTURI	54.276	51.845	106.121
D 14	TARUB	48.145	46.554	94.699
i 15	KRAMAT	62.450	61.301	123.751
n 16	SURADADI	52.470	50.635	103.105
a 17	WARUREJA	38.343	36.656	74.999
s 18	DUKUHWARU	37.791	37.047	74.838
K	JUMLAH	894.299	863.190	1.757.489

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal



D. Jumlah Kecamatan

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. 5 kelurahan berada di Kecamatan Slawi yaitu Kelurahan Slawi Wetan, Kelurahan Kudaile, Kelurahan Procot, Kelurahan Pakembaran, Kelurahan Kagok serta Kelurahan Dampyak di Kecamatan Kramat.

Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Km ²)
1	Margasari	13	100,8
2	Bumijawa	18	109,2
3	Bojong	17	67,7
4	Balapulang	20	86,2
5	Pagerbarang	13	45,8
6	Lebaksiu	15	47,0
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Pangkah	23	37,6
10	Slawi	10	13,8
11	Dukuhwaru	10	26,3
12	Adiwerna	21	27,0
13	Dukuhturi	18	17,1
14	Talang	19	18,9
15	Tarub	20	28,0
16	Kramat	20	43,9
17	Suradadi	11	58,8
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2025



E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Daerah

1) Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 18. Dinas Perikanan; dan
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri atas :
1. Kecamatan Margasari;
 2. Kecamatan Bumijawa;
 3. Kecamatan Bojong ;
 4. Kecamatan Balapulang ;
 5. Kecamatan Pagerbarang ;
 6. Kecamatan Lebaksiu ;
 7. Kecamatan Jatinegara ;
 8. Kecamatan Kedungbanteng ;
 9. Kecamatan Pangkah ;
 10. Kecamatan Slawi ;
 11. Kecamatan Dukuhwaru ;
 12. Kecamatan Adiwerna ;
 13. Kecamatan Dukuhturi ;
 14. Kecamatan Talang ;
 15. Kecamatan Tarub ;
 16. Kecamatan Kramat ;
 17. Kecamatan Suradadi ; dan
 18. Kecamatan Warureja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal:

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo; dan
2. Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.

2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari UPTD Satuan Pendidikan yaitu:
 - a. SPF Taman Kanak-Kanak;
 - b. SPF Sekolah Dasar;
 - c. SPF Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. UPT Instalasi Farmasi Kelas A;
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 - c. UPT Wisata Kesehatan Jamu Kelas A; dan
 - d. Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas.
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah I Kelas A;
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah II Kelas A;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah III Kelas A;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah V Kelas A; dan
 - f. UPT Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Penataan Bangunan Wilayah VI Kelas A.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. UPT Perumahan dan Permukiman Wilayah I Kelas A;
 - b. UPT Perumahan dan Permukiman Wilayah II Kelas A;
 - c. UPT Perumahan dan Permukiman Wilayah III Kelas A; dan
 - d. UPT Pemakaman Kelas B.
5. Dinas Sosial memiliki UPT Loka Bina Karya Kelas A.
6. Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Latihan Kerja Kelas A;
 - b. UPT Lingkungan Industri Kecil Kelas A; dan
 - c. UPT Lab. Perindustrian Kelas A.



7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A; dan
 - b. UPT Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah Kelas B.
9. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Obyek Wisata Kelas A; dan
 - b. UPT Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga Kelas B.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
 - a. UPT Perlindungan Tanaman Kelas A;
 - b. UPT Pembibitan Dan Teknologi Pertanian Kelas A; dan
 - c. UPT Rumah Potong Hewan Kelas A.
11. Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPT Balai Benih Ikan Kelas A, dan
 - b. UPT Tempat Pelelangan Ikan Kelas B.
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. UPT Pasar Wilayah I Kelas A;
 - b. UPT Pasar Wilayah II Kelas A;
 - c. UPT Pasar Wilayah III Kelas A;
 - d. UPT Pasar Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPT Pasar Wilayah VI Kelas A; dan
 - f. UPT Metrologi Legal Kelas A
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki UPT Penilaian Kompetensi ASN Kelas A.

- **Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah; dan



9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

3) Pegawai Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai haruslah mempunyai dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Berikut rincian jumlah ASN Kabupaten Tegal.

Rincian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tegal Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional (PNS dan PPPK)	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tegal	18	70	148	236
2	Sekretariat DPRD Kab. Tegal	9	2	54	65
3	Inspektorat	6	53	7	66
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	25	26	61
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	14	30	55
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12	13	30	55
7	Badan Pendapatan Daerah	11	4	60	75
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8	26	23	57
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	27	19	48
10	Dinas Perikanan	7	6	40	53
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6	16	60	82
12	Dinas Kesehatan	13	1.628	304	1.945
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	25	32	63
14	Dinas Lingkungan Hidup	8	9	304	321
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	8	10	152	170
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	50	377	438
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	14	22	43
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	7	43	57
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	20	24	47
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9	7.213	1.274	8.496
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	11	12	151	174



No.	Nama Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional (PNS dan PPPK)	Pelaksana	
22	Dinas Perhubungan	10	9	258	277
23	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	9	25	44	78
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11	108	63	182
25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	8	19	75	102
26	Dinas Sosial	7	13	32	52
27	Satuan Polisi Pamong Praja	10	33	88	131
28	RSUD Dr. Soeselo Slawi	9	611	139	759
29	RSUD Suradadi	10	219	33	262
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	5	13	21
31	Kecamatan Adiwerna	7	1	15	23
32	Kecamatan Balapulang	4	2	16	22
33	Kecamatan Bojong	7	2	19	28
34	Kecamatan Bumijawa	6	2	16	24
35	Kecamatan Dukuhturi	5	1	13	19
36	Kecamatan Dukuhwaru	4	4	10	18
37	Kecamatan Jatinegara	7	2	13	22
38	Kecamatan Kedungbanteng	6	1	20	27
39	Kecamatan Kramat	9	1	19	29
40	Kecamatan Lebaksiu	7	2	13	22
41	Kecamatan Margasari	7	1	16	24
42	Kecamatan Pagerbarang	5	1	12	18
43	Kecamatan Pangkah	5	2	16	23
44	Kecamatan Slawi	26	2	34	62
45	Kecamatan Suradadi	3	2	14	19
46	Kecamatan Talang	6	1	13	20
47	Kecamatan Tarub	5	1	15	21
48	Kecamatan Warureja	5	-	9	14
JUMLAH		384	10.314	4.208	14.906

Sumber: BKPSDM Kab. Tegal

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2025	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.123.726.765.805,00	3.110.318.788.047,02	99,57	2.993.701.597.090,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	732.724.279.000,00	731.692.733.050,02	99,85	602.836.541.784,47
4.1.01	Pajak Daerah	349.087.633.000,00	319.347.822.179,00	91,48	208.450.106.295,00
4.1.02	Retribusi Daerah	347.307.181.000,00	365.021.543.160,02	105,10	356.132.261.707,47



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2025	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.387.603.000,00	22.993.196.214,00	112,78	19.597.159.894,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.941.862.000,00	24.330.171.497,00	152,61	18.657.013.888,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	732.724.279.000,00	731.692.733.050,02	99,85	602.836.541.784,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.391.002.486.805,00	2.378.626.054.997,00	99,48	2.387.793.407.306,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.809.126.435.120,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	38.009.124.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.235.995.119.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	79.999.415.685,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	455.122.776.435,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	39.442.862.000,00	33.709.756.600,00	85,46	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.305.134.049.000,00	1.303.491.093.061,00	99,87	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	551.044.073.305,00	548.841.332.556,00	99,60	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.895.620.984.305,00	1.886.042.182.217,00	99,49	1.809.126.435.120,00
4.2.01.05	Dana Desa	321.870.852.000,00	321.730.623.000,00	99,95	316.239.825.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.231.265.000,00	7.231.265.000,00	100,00	12.930.103.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	329.102.117.000,00	328.961.888.000,00	99,95	329.169.928.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.279.385.500,00	163.621.984.780,00	98,40	249.497.044.186,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	157.348.732.000,00	154.873.323.614,00	98,42	226.314.945.686,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.930.653.500,00	8.748.661.166,00	97,96	23.182.098.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	166.279.385.500,00	163.621.984.780,00	98,40	249.497.044.186,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.391.002.486.805,00	2.378.626.054.997,00	99,48	2.387.793.407.306,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	3.071.648.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.123.726.765.805,00	3.110.318.788.047,02	99,57	2.993.701.597.090,47
5	BELANJA DAERAH	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00	94,53	3.091.890.258.655,80
5.1	BELANJA OPERASI	2.368.203.152.339,00	2.215.332.470.671,00	93,54	2.228.815.083.770,80
5.1.01	Belanja Pegawai	1.271.343.359.377,00	1.199.553.911.642,00	94,35	1.165.882.185.148,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.231.242.462,00	900.910.267.590,00	91,81	903.280.437.788,80
5.1.05	Belanja Hibah	93.078.150.500,00	92.587.598.939,00	99,47	130.417.060.834,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.550.400.000,00	22.280.692.500,00	98,80	29.235.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.368.203.152.339,00	2.215.332.470.671,00	93,54	2.228.815.083.770,80
5.2	BELANJA MODAL	417.124.245.498,00	399.297.238.516,00	95,72	364.288.585.185,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.943.287.000,00	3.749.375.000,00	41,92	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.276.749.270,00	112.650.087.395,00	96,05	93.915.643.627,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.039.745.152,00	80.023.255.964,00	95,22	117.628.988.778,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.149.820.558,00	176.193.275.755,00	97,80	131.886.142.737,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.371.364.438,00	26.388.086.692,00	100,06	20.849.910.043,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	343.279.080,00	293.157.710,00	85,39	7.900.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	417.124.245.498,00	399.297.238.516,00	95,72	364.288.585.185,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2025	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.665.000.000,00	2.151.147.271,00	80,71	1.706.027.596,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.665.000.000,00	2.151.147.271,00	80,71	1.706.027.596,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.665.000.000,00	2.151.147.271,00	80,71	1.706.027.596,00
5.4	BELANJA TRANSFER	497.086.729.000,00	488.810.717.000,00	98,33	497.080.562.104,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	21.357.032.400,00	14.183.853.900,00	66,41	20.960.911.579,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.542.967.600,00	3.587.363.100,00	78,96	2.628.825.525,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	470.186.729.000,00	470.039.500.000,00	99,96	473.490.825.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	497.086.729.000,00	488.810.717.000,00	98,33	497.080.562.104,00
	JUMLAH BELANJA	3.285.079.126.837,00	3.105.591.573.458,00	94,53	3.091.890.258.655,80
	SURPLUS/DEFISIT	(161.352.361.032,00)	4.727.214.589,02	(2,92)	(98.188.661.565,33)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	161.352.361.032,00	161.353.492.396,63	100,00	266.541.022.597,96
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.852.361.032,00	169.853.492.396,63	100,00	272.541.022.597,96
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.352.361.032,00	168.352.361.032,63	100,00	236.131.976.034,96
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	33.800.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.501.131.364,00	100,07	2.609.046.563,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.852.361.032,00	169.853.492.396,63	100,00	272.541.022.597,96
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	161.352.361.032,00	161.353.492.396,63	100,00	266.541.022.597,96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	166.080.706.985,65	0,00	168.352.361.032,63

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2025 (unaudited)

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2025 di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi maka permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
a) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Tegal adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, sektor jasa (termasuk di dalamnya pariwisata dan informasi) tumbuh dengan pesat. Pengembangan industri pengolahan melalui peningkatan produktivitas pekerja merupakan hal krusial yang harus dilakukan, meskipun *turnover* pekerja yang tinggi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan luasan lahan non terbangun yang luas, hilirisasi pertanian juga perlu dilaksanakan untuk mendukung kemajuan sektor industri pengolahan. Selanjutnya, infrastruktur juga harus disediakan, utamanya konektivitas, air bersih, energi, dan telekomunikasi.

Selanjutnya, pengembangan sektor perdagangan (dan juga UMKM), infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, gudang, dan fasilitas logistik, memastikan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti penyederhanaan proses perizinan, insentif pajak, dan dukungan finansial, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi. Pemanfaatan TIK menjadi faktor kunci dalam modernisasi sektor perdagangan, memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dengan sinergi antara infrastruktur yang kuat, kebijakan yang mendukung, dan inovasi TIK, sektor perdagangan dapat tumbuh dinamis dan berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sektor pertanian, pengembangan sektor pertanian adalah kunci untuk mempertahankan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tukar petani. Peningkatan layanan infrastruktur, seperti irigasi dan konektivitas transportasi, menjadi dasar untuk memperlancar distribusi input pertanian —termasuk bibit, pupuk, dan air—yang vital bagi produktivitas lahan. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi modern dan mekanisasi perlu didorong, sementara hilirisasi pertanian akan menambah nilai produk dan membuka pasar baru. Pemanfaatan teknologi informasi



dan komunikasi (TIK) memungkinkan petani mengakses informasi pasar, teknik budidaya, dan kondisi cuaca dengan lebih mudah dan cepat. Adaptasi terhadap faktor eksternal, seperti pemanasan global dan kebijakan negara lain, menjadi tantangan yang harus diatasi dengan inovasi dan respons yang tepat. Kebijakan pemerintah yang mendukung, termasuk subsidi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan, sangat penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

Pengembangan sektor jasa, (khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif), memerlukan fokus pada peningkatan akomodasi dan kualitas *hospitality* untuk memberikan pengalaman wisata yang baik bagi pengunjung. Peningkatan dalam hal pelayanan dan pengelolaan wisata diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dari pemandu wisata, pengelola objek wisata, atau pelaku usaha kecil. Infrastruktur yang menunjang, termasuk transportasi, fasilitas umum, dan akses ke destinasi wisata, sangat penting untuk mendukung kelancaran perjalanan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif untuk investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata yang efektif, akan memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Kombinasi antara kualitas *hospitality* yang unggul, akomodasi yang memadai, pengalaman wisata yang menarik, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang proaktif akan mendorong pertumbuhan sektor jasa yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Komponen terakhir dari pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan yang efektif harus dimulai dengan pendekatan "membangun dari pinggiran," yang memberikan afirmasi kepada daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Pembangunan ini harus berbasis potensi riil yang dimiliki oleh setiap desa, seperti pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam lokal, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri, dimana desa mampu mengelola sumber daya dan ekonominya secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya mengurangi ketimpangan antara kota dan desa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.



b) Daya Saing Daerah

Daya saing daerah memiliki keterkaitan erat dengan iklim berusaha, stabilitas ekonomi makro, dan kapabilitas inovasi. Iklim berusaha yang kondusif sangat bergantung pada daya saing daerah, yang mencakup penerimaan masyarakat terhadap investasi, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Daerah dengan daya saing tinggi akan mampu menarik lebih banyak investor karena menawarkan stabilitas, keamanan, dan potensi pertumbuhan.

Daya saing daerah juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Inflasi yang terkendali memberikan kestabilan harga yang penting bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat diprediksi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan peluang investasi yang lebih baik, yang akan menarik investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Kebijakan fiskal yang efektif, seperti pengelolaan anggaran yang efisien dan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, akan mendukung daya saing melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan fasilitasi aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, daya saing daerah juga berkaitan erat dengan kapabilitas inovasi. Institusi pendidikan dan lembaga penelitian memainkan peran sentral dalam mendukung proses inovasi ini, dengan menyediakan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan memperkuat ekosistem inovasi, dan memastikan bahwa hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif dalam industri. Dengan kapabilitas inovasi yang kuat, daerah tidak hanya meningkatkan daya saing ekonominya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan bagi pertumbuhan jangka panjang.

c) Lapangan Pekerjaan yang Luas

Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas berkaitan erat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), produktivitas pekerja,



infrastruktur, kebijakan pemerintah, pengembangan wirausaha, dan kesejahteraan pekerja.

TPT hingga saat ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal; dan di tahun 2023 TPT Kabupaten Tegal berada pada urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun investasi yang masuk (dan membuka lapangan kerja) di Kabupaten Tegal relatif banyak seiring dengan naiknya UMK Jabodetabek dan dibukanya exit tol Adiwerna, namun akselerasi penurunan TPT masih relatif lambat. TPT yang tinggi sering kali terkait dengan tingginya *turnover* pekerja, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Ketidakseimbangan ini menggarisbawahi pentingnya program *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di mana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Selain itu, membangun mental pekerja yang tangguh dan adaptif juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah. Dengan keterampilan yang relevan dan mental yang kuat, pekerja tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan tetapi juga lebih mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan kerja yang kompetitif, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan.

2) Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah

a) Konektivitas Wilayah

Tantangan dalam mewujudkan wilayah yang terkoneksi dengan baik adalah aksesibilitas jalan, sarana transportasi, pemajuan desa tertinggal dan desa berkembang serta disparitas wilayah yang masih tinggi. Aksesibilitas jalan dan jembatan yang masih perlu dioptimalkan adalah kuantitas jalan dan jembatan meliputi pemerataan ruas dan trayek, kemantapan kualitas jalan meliputi sinergitas pembangunan meliputi pengendalian perbaikan pasca pengembangan utilitas serta pemenuhan perlengkapan jalan dan jembatan. Tantangan dalam penyediaan sarana transportasi yang layak yaitu belum tersedianya sarana transportasi publik untuk semua ruas jalan kabupaten, masih belum optimalnya manajemen lalu lintas yang mengatur mobilitas penduduk secara optimal, masih belum optimalnya kontrol kelaikan kendaraan, belum tersedianya



hub transportasi seperti halte, terminal dan agen di semua ruas jalan serta masih terbatasnya kantong parkir berizin di wilayah yang aktivitas transportasinya tinggi. Tantangan dalam mendorong desa tertinggal dan berkembang menjadi desa maju dan mandiri adalah penyediaan prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan.

b) Infrastruktur Pokok Masyarakat

Tantangan dalam pemenuhan infrastruktur dasar di antaranya adalah belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur digital. Permasalahan dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan adalah belum meratanya pembangunan sarana prasarana pendidikan, fasilitas yang belum sesuai standar dan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan infrastruktur kesehatan adalah sebaran fasilitas yang belum merata, fasilitas saat ini yang belum optimal dan pemeliharaan sarana kesehatan yang tidak berkelanjutan. Hambatan dalam pencapaian infrastruktur perekonomian adalah belum tersedianya prasarana perdagangan, belum optimalnya prasarana saat ini, optimalisasi rantai pasok dan jaringan irigasi. Infrastruktur perdagangan yang perlu dibangun meliputi pasar induk dan sub terminal agribisnis (STA). Selain itu, fungsi pasar induk yang ada saat ini belum berfungsi optimal karena masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik, sehingga harga komoditas tidak dapat dikendalikan. Sub terminal agribisnis (STA) juga belum ada dan belum terlembaga, sehingga masih bergantung pada tengkulak.

c) Hunian Layak

Tantangan bagi penyediaan aksesibilitas hunian layak meliputi penyediaan hunian yang belum optimal, akses sanitasi lingkungan berupa sarana prasarana persampahan (TPA,TPST,TPS3R & Bank Sampah), instalasi pengolahan limbah (IPAL dan IPLT) serta fasilitas pengolahan limbah domestik skala rumah tangga seperti Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Setempat dan SPAL Domestik Terpusat.



Kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan hunian layak di Kabupaten Tegal meliputi optimalisasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian layak. Pembangunan baru belum optimal disebabkan meliputi backlog hunian yang masih besar dikarenakan belum optimalnya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan bantuan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu, bantuan langsung relokasi program pemerintah dan bantuan langsung rehabilitasi korban bencana yang belum optimal. Peningkatan kualitas hunian masih memiliki kendala meliputi data yang belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta biaya swadaya yang belum siap, selain itu rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana yang belum optimal meliputi data yang tersedia belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta pembagian kewenangan yang belum optimal.

Tantangan lain yang masih belum optimal adalah penyediaan akses air minum berupa jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Jaringan Perumda Air Minum, bukan jaringan perpipaan seperti sumur rumah tangga dan sumber air seperti mata air dan badan air lainnya. Prasarana umum permukiman masih perlu ditingkatkan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, akses listrik, akses internet, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

d) Penataan Ruang Kabupaten Tegal

Tantangan dalam mewujudkan penataan ruang yang baik adalah komitmen dan kepatuhan kawasan strategis penataan kota Slawi yang belum optimal di antaranya penataan yang belum berperspektif kebudayaan dan revitalisasi bangunan heritage. Selain itu ketidakpatuhan terhadap pola ruang meliputi ruang budidaya seperti wisata, pertanian, industri, permukiman dan ruang lindung seperti konservasi, cagar budaya masih terjadi. Penataan struktur ruang juga belum optimal sesuai dengan rencana, pusat permukiman dalam PKL, PPK dan PPL perlu memperhatikan bangkitan dan tarikan serta masih tumbuh mengikuti mekanisme pasar dan belum sepenuhnya mengikuti struktur ruang yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi untuk sistem jaringan prasarana adalah persebaran belum merata berdasarkan struktur ruang yang ditetapkan.



e) Infrastruktur Inklusif

Kelompok rentan yang masih perlu diafirmasi dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas adalah kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan kelompok anak. Sarana prasarana dasar yang belum ramah disabilitas, lansia, perempuan dan anak masih banyak ditemui baik milik pemerintah maupun milik publik. Sarana prasarana inklusif yang masih perlu dipenuhi adalah sarana prasarana yang memudahkan mobilitas kelompok disabilitas dan lansia dalam mengakses infrastruktur dasar. Sementara sarana prasarana yang harus disediakan untuk kelompok perempuan dan anak adalah infrastruktur yang melindungi dan melayani kebutuhan perempuan dan anak yang terbebas dari kekerasan dan memberi rasa aman.

3) Manajemen Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup

a) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Sumber daya alam memiliki permasalahan yaitu manajemen yang masih belum optimal yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air, pengelolaan pertambangan, terjadinya degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati dan juga belum optimalnya pengelolaan berkelanjutan untuk wisata berbasis alam.

Keanekaragaman hayati menjadi isu pendukung dalam sumber daya alam, namun yang terjadi di Kabupaten Tegal mulai terjadi permasalahan yaitu mulai berkurangnya flora dan fauna endemik, yaitu jalak suren, dan mangga wirasangka serta dukuh kesuben. Pengurangan keanekaragaman hayati ini menjadi isu penting untuk dilakukan penanganan sebelum terjadi permasalahan lainnya.

b) Degradasi Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan hidup yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal dari pencemaran air, pencemaran udara, berkurangnya tutupan lahan, dan masalah pengelolaan persampahan. Pencemaran air disebabkan oleh adanya aktivitas industri baik industri besar maupun industri rumah tangga seperti industri batik, industri



peleburan logam dan lain-lain, selain itu disebabkan oleh belum terkelolanya sanitasi rumah tangga.

Pencemaran udara menjadi permasalahan disebabkan oleh cukup banyak industri yang ada di Kabupaten Tegal, kebakaran lahan dan sampah, tingginya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, dan terjadinya polusi suara. Permasalahan industri disebabkan oleh belum optimalnya pengolahan hasil industri (limbah pengolahan) terutama industri *batching plant*, pengolahan kapur, peleburan logam, dan pemecahan batu. Beberapa industri tersebut berlokasi di Kecamatan Margasari dan Adiwerna.

Berkurangnya tutupan lahan terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan, dan deforestasi. Permasalahan alih fungsi lahan disebabkan makin tingginya permintaan permukiman dan tingginya aktivitas industri, sedangkan kasus deforestasi terjadi dengan banyaknya perubahan jenis tanaman di kawasan hutan dari yang merupakan tegakan tinggi menjadi tanaman yang lebih rendah dan juga kurangnya penegakan hukum.

Selain itu sampah juga merupakan hal yang menjadi perhatian ke depan dikarenakan kurang optimalnya 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta perlu juga mempertimbangkan adanya sirkuler ekonomi yang seharusnya sudah dilakukan tetapi masih terkendala adanya keterbatasan pengetahuan dan belum terbangunnya *supply chain/integrated industry*.

c) Global Warming (Pemanasan Global)

Perubahan iklim di Kabupaten Tegal menjadi salah satu penyebab isu dikarenakan adanya pengurangan GRK (Gas Rumah Kaca) yang masih belum optimal, terjadinya kenaikan muka air laut, serta terjadinya bencana alam, namun perubahan iklim ini memiliki potensi yaitu adanya perdagangan karbon/emisi. Penurunan GRK di Kabupaten Tegal hingga tahun 2024 baru sebanyak 49.930,59 tonCO₂EQ dari jumlah total GRK yaitu 246,052,000 tonCO₂EQ yang tergolong masih belum optimal.

d) Berbasis Masyarakat

Manajemen sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan berbasis masyarakat meliputi



upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat serta mengoptimalkan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pengelolaan SDA berkelanjutan. Upaya penumbuhan kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan di masyarakat, mendorong terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Setelah kesadaran masyarakat tumbuh, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pembentukan lembaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA sesuai jenisnya (air, udara, tutupan lahan) maupun sesuai jenis aktivitasnya (reuse, reduce, recycle). Keterlibatan masyarakat diharapkan memperbesar manfaat yang diperoleh masyarakat dari sumber daya alam berkelanjutan baik manfaat ekonomi, maupun manfaat non ekonomi seperti kualitas hidup yang lebih baik, dan sumber daya alam yang terjaga hingga generasi yang akan datang.

4) Sumber Daya Manusia yang Produktif

a) Mutu Pendidikan

Tantangan peningkatan mutu pendidikan meliputi kualitas pendidikan, akses yang terbatas dalam pendidikan dan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ditunjukkan melalui masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Beberapa faktor yang menyebabkan literasi rendah diantaranya kualitas pembelajaran. Perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan bagi pendidik, peserta didik bahkan orang tua. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih lemahnya peran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi di bidangnya, permasalahan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan oleh kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang tersertifikasi. Tantangan lain yang menjadi faktor pengaruh kemampuan numerasi peserta didik di antaranya penempatan pendidik bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya, yang menyebabkan pendidik tidak bisa optimal dalam mengajar, sistem pembelajaran pendidik yang masih belum mampu menggali potensi dan kemampuan peserta didik, keterbatasan fasilitas TIK dan masih rendah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan TIK. Keterbatasan akses terhadap pendidikan masih menjadi kendala yang perlu diatasi di antaranya biaya pendidikan



sekolah yang masih dianggap membebani masyarakat, akses ke sekolah yang dipengaruhi oleh bentuk geografis wilayahnya, di mana pada wilayah yang memiliki dataran tinggi atau pegunungan seperti Bumijawa, Bojong dan Jatinegara masih terkendala dalam akses ke sekolah, selain itu iklim keamanan dan inklusivitas yang mencakup bebas kekerasan, diskriminasi dan kesetaraan gender serta layanan disabilitas masih perlu diperlukan. Permasalahan dalam pendidikan anak usia dini adalah masih banyaknya lembaga satuan pendidikan PAUD yang belum terakreditasi yang disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi serta advokasi pada lembaga PAUD terkait kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta lemahnya pembinaan manajemen PAUD yang mencakup persiapan administrasinya sampai dengan penyediaan sarana prasarannya seperti penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tantangan lain pada jenjang pendidikan anak usia dini adalah menjadi guru PAUD harus berkompeten yang disebabkan pengembangan karier pada profesi guru PAUD belum optimal.

b) Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) aspek yaitu angka kesakitan, angka kematian, gerakan kesehatan masyarakat, dan dipengaruhi juga oleh jaminan kesehatan. Angka kematian yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Masih terdapat angka kematian ibu, kematian bayi, dan kematian anak, mengindikasikan pelayanan kesehatan belum optimal pada angka umur tersebut.

Pada aspek angka kesakitan ditopang oleh 2 (dua) penyebab yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, angka kesakitan pada penyakit tidak menular menunjukkan tren semakin meningkat terutama disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih instan, kurang gerak, tingkat stres tinggi, dan pada sebagian orang mengonsumsi rokok dan alkohol. Penyakit-penyakit seperti jantung, diabetes melitus, obesitas, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya menjadi kasus-kasus yang menonjol. Pada penyakit menular Kabupaten Tegal termasuk endemik untuk jenis-



jenis penyakit tropik yang terabaikan seperti HIV, tuberkulosis, malaria, kusta, dan filariasis.

Untuk akses kesehatan wilayah-wilayah di selatan Kabupaten Tegal dan perbatasan seperti Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, dan Kecamatan Jatinegara belum terakses fasilitas layanan rujukan setingkat rumah sakit tipe D. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan rujukan harus menuju kecamatan-kecamatan atau wilayah yang lebih jauh. Upaya mengeliminasi angka kesakitan dan angka kematian dilakukan melalui skema gerakan masyarakat sehat (GERMAS), upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif masih perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat mengelola kesehatannya secara mandiri dan tidak perlu berobat pada fasilitas pelayanan kesehatan.

c) Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan program yang mengintervensi masyarakat miskin yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi wilayah kantong kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem.

Permasalahan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial adalah masih adanya masyarakat yang masih menyandang miskin ekstrem yang disebabkan tingkat pendidikan masih rendah, tingkat kompetensi dan manajerial usaha yang rendah, tidak produktif dalam usaha dan menempati pada wilayah yang sanitasinya kurang memadai, kumuh dan terpencil. Tantangan lain dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah masih lemahnya program perlindungan sosial terutama terbatasnya penyediaan sistem layanan dan rujukan terpadu, hal ini dikarenakan SDM pekerja sosial, sarana perlindungan seperti rumah singgah atau rumah aman yang masih terbatas selain itu juga layanan pemakanan dan layanan rujukan pendidikan maupun kesehatan.



d) Keterampilan dan Penguasaan Teknologi

Keterampilan dan penguasaan teknologi menjadi salah satu isu dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal. Keterampilan dan penguasaan teknologi yang perlu dimiliki oleh masyarakat berupa pelatihan untuk menyongsong era *society* 5.0, tingkat pendidikan tenaga kerja yang kompetitif, akses sarana prasarana digital dan kematangan literasi digital. Tantangan dalam penyediaan tenaga terlatih pada era TIK adalah penyediaan lembaga terakreditasi, instruktur bersertifikat, dan metode pembelajaran yang *link and match* dengan kebutuhan pasar kerja. Tantangan tenaga kerja agar memiliki tingkat pendidikan yang kompetitif dalam bersaing di pasar kerja adalah *mismatch* pendidikan formal (SMK) dengan kebutuhan industri misalnya sarana prasarana praktik kerja industri di pendidikan formal saat ini cenderung berupa sarana prasarana yang bersifat individual dan sederhana, sementara peralatan yang digunakan industri bersifat mekanisasi dan spesifikasi alat berteknologi tinggi. Selain itu permasalahan tenaga kerja yang kompetitif adalah karakter pekerja yang memiliki mental dan daya juang yang tangguh. Karena tenaga kerja masih belum memiliki mental pekerja yang tangguh, tingkat pengunduran diri pekerja masih tinggi. Tantangan sarana prasarana digital yang belum optimal diantaranya cakupan akses internet yang belum terhubung di semua wilayah, biaya akses internet yang belum sepenuhnya gratis/murah, akses kreatif hub berupa *workshop* untuk ekonomi kreatif. Selain itu perlu ditumbuhkan akses sarana prasarana yang telah disediakan untuk dapat digunakan secara bertanggung jawab. Literasi digital yang belum bertanggung jawab perlu dioptimalkan di antaranya bijak menggunakan internet sehat, bijak memanfaatkan ekonomi digital, dan pemasaran digital.

5) Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan

a) Keluarga Berkualitas

Tantangan dalam membangun keluarga sejahtera dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain aspek ketenteraman, aspek kemandirian dan aspek kebahagiaan. Lemahnya pada aspek ketenteraman disebabkan masih adanya keluarga yang belum memiliki pencatatan sipil, banyak hal yang menyebabkan ini seperti



pernikahan siri, pernikahan yang belum dicatatkan, angka perceraian serta pernikahan anak usia dini.

Pada aspek kemandirian, penyediaan akses pendidikan juga belum optimal yang mencakup pendidikan menengah dan tinggi, disisi lain penyediaan akses layanan kesehatan juga belum optimal hanya sekitar 80 % yang telah terjamin dalam jaminan kesehatan nasional. Adapun untuk aspek kebahagiaan, tantangan yang akan dihadapi dalam membangun keluarga sejahtera adalah lemahnya interaksi di dalam keluarga seperti keberadaan gadget yang membuat interaksi dalam keluarga berkurang, kurangnya interaksi anggota keluarga dengan masyarakat, Penyalahgunaan narkoba serta melakukan judi online. Selain itu perilaku seksual yang menyimpang juga akan menghambat dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang disebabkan karena salah pergaulan, penggunaan informasi yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya kepedulian sosial, keluarga dan masyarakat.

b) Perlindungan Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal semakin meningkat, hal ini disebabkan karena lemahnya upaya pencegahan sebelum kasus kekerasan terjadi dan penanganan kasus setelah terjadi kekerasan. Upaya pencegahan yang masih lemah, dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, advokasi dan sosialisasi upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak, penegakan hukum yang akan berdampak pada jaminan sosial keluarga seperti pemenuhan kebutuhan keluarga akibat kehilangan kepala keluarga yang tersandung kasus hukum pidana.

c) Ketimpangan Gender

Permasalahan dalam penanganan ketimpangan gender di Kabupaten Tegal meliputi beberapa hal diantaranya terkait kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan peluang pasar tenaga kerja. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah belum tumbuhnya kesadaran remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksinya, hal ini bisa terjadi karena penyakit bawaan yang membuat kesulitan dalam melahirkan, kondisi



kehamilan yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering maupun terlalu banyak, keterlambatan pelayanan rujukan dalam persalinan serta tidak adanya perhatian pada kesehatan reproduksi remaja secara optimal dalam upaya membangun kesiapan untuk menikah dan melahirkan.

Lemahnya pemberdayaan juga menjadi hambatan dalam membangun kesetaraan gender di Kabupaten Tegal, seperti jumlah perempuan yang mengakses pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah daripada laki-laki, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pendidikan dan prestasi perempuan dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah pertama. Lain halnya pemberdayaan perempuan pada bidang politik yang perlu dioptimalkan, sehingga jumlah partisipasi perempuan pada lembaga legislatif bisa berjalan optimal.

Program dalam upaya mengurangi ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja masih lemah, karena jumlah tenaga kerja perempuan atau perempuan yang bekerja di dalam rumah cukup berimbang apabila dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja dalam rumah tangga. Selain itu sumbangan pendapatan istri lebih kecil dibandingkan sumbangan pendapatan suami dalam rumah tangga karena masih rendahnya perempuan bekerja tidak menduduki peran-peran manajer. Disisi lain industri *fashion* atau garmen dalam menyerap tenaga kerja sebagian besar perempuan sebagai posisi pekerja atau buruh.

d) Pemajuan Budaya

Permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal adalah kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan masih terbatas pada seni, cagar budaya atau sesuatu yang bersifat kuno, aktivitas objek pemajuan kebudayaan seperti manuskrip tidak dilakukan sebagai ritus bagian masyarakat atau tidak menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dengan berkembangnya zaman, objek pemajuan kebudayaan permainan tradisional tidak dilakukan sehari-hari oleh anak-anak maupun masyarakat di Kabupaten Tegal, hanya diketahui jenis dan karakteristiknya ketika dimainkan pada saat festival atau event tertentu. Selain itu pengguna peralatan tradisional atau teknologi tradisional mulai ditinggalkan karena tidak efisien. Pengetahuan



terhadap tradisional seperti pranoto mongso maupun rasi bintang mulai ditinggalkan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan peralatan yang lebih modern.

e) Wawasan Kebangsaan

Potensi yang dapat dilihat dari topik wawasan kebangsaan yaitu pada identitas/nilai, partisipasi politik dan solidaritas. Potensi identitas /nilai yang ada yaitu egaliter, jika pekerja keras, jiwa kewirausahaan dan kemampuan merantau. Potensi yang dapat dilihat dari egaliter adalah karakter individu yang bisa bekerja sama serta cenderung terbuka menerima perubahan. Kemudian jiwa pekerja keras memiliki kecenderungan mandiri secara ekonomi dan dalam melakukan pekerjaan selalu tuntas dan dengan hasil baik. Selanjutnya pada potensi jiwa kewirausahaan mencerminkan orang yang inovatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memiliki daya saing tinggi di luar daerah. Terakhir kemampuan merantau juga terdapat potensi mendatangkan devisa untuk daerah dan membawa ilmu pengetahuan baru untuk daerah. Yang kedua pada potensi partisipasi politik yang juga menjadi kunci penguat kemajuan daerah, namun pada hal ini masih ada yang perlu dibenahi terlebih dahulu yaitu tentang penguatan ideologi pemilih untuk mengurangi tingkat *swing voter* yang sering kali dimanfaatkan oleh pemain politik hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan Pendidikan politik dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang ideal. Isu terakhir adalah potensi solidaritas di masyarakat yang ditunjukkan antara lain pada saat terjadi bencana masyarakat dengan cepat tanggap dan keikhlasan untuk saling membantu dan pada kegiatan gotong royong di mana pada saat kegiatan tradisi masyarakat tanpa diarahkan oleh pemerintah berinisiatif melakukan hal tersebut dengan baik, hal itu juga secara tidak langsung memberikan pesan kesetiakawanan sosial untuk generasi penerus.

f) Nilai Keagamaan

Tantangan pelaksanaan urusan keagamaan di wilayah Kabupaten Tegal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terkait dengan permasalahan toleransi terhadap kerukunan internal seagama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat



beragama dengan pemerintah serta pelaksanaan mitigasi konflik SARA di Kabupaten Tegal.

Selain itu, permasalahan pelaksanaan urusan keagamaan di Kabupaten Tegal adalah terkait literasi keagamaan yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu karena lemahnya peran keluarga dalam membangun pendidikan agama di rumahnya, sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya jam mata pelajaran agama disekolah, sehingga hal ini berdampak pada implementasi norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

Pemahaman sekularisme dan pluralisme pun menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan keagamaan di Kabupaten Tegal, hal ini disebabkan karena tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa aturan agama dan aturan sosial harus dipisahkan. Disisi lain, persoalan pemahaman pluralisme pun menjadi bias yang disebabkan masih lemahnya sikap saling menghargai perbedaan serta memaksakan perlakuan nilai keagamaan.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a) Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tantangan yang harus dihadapi adalah terkait kebijakan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang kualitas pelayanan publik. Permasalahan maupun potensi pada aspek kebijakan meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal (mandatori). Kebijakan internal terdapat tantangan belum semua kebijakan memiliki SOP dan juga terdapat beberapa SOP yang belum operasional. Penyebab terdapat SOP yang belum operasional antara lain karena faktor SDM yang belum ter-update kompetensinya, alur SOP yang dirasa belum efisien, dan Belum banyak terdapat mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat.

Tantangan pada penyiapan sumber daya manusia adalah kompetensi, profesionalitas, dan jumlah SDM. Pada permasalahan kompetensi tantangannya adalah *soft skill* dan kapasitas tentang pelayanan publik, kapasitas pelayanan publik dipengaruhi oleh pelatihan dan mentoring. Perlu memperkuat komitmen maklumat pelayanan yang bisa dicapai dengan pelatihan, internalisasi dan



pemberian insentif. Faktor jumlah juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik jika tidak dilakukan evaluasi, maka dari itu evaluasi penting untuk pemerintahan bisa melakukan rekrutmen dan redistribusi.

Terakhir berkenaan dengan sarana prasarana bisa dikategorikan menjadi dua yaitu sarana prasarana fisik dan sarana prasarana digital. Standar minimal terkait dengan sarana prasarana fisik setidaknya memuat kelengkapan, standarisasi, dan sarana prasarana yang modern. Untuk sarana prasarana digital perlu memperhatikan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengintegrasian. Pengembangan yang dilakukan patut memperhitungkan tingkat kemudahan untuk diakses oleh masyarakat.

b) Akuntabilitas Kinerja

Faktor penyebab permasalahan yang ada antara lain aspek perencanaan kinerja, integrasi kinerja, pelaporan kinerja, partisipasi publik. Penjelasan pada perencanaan kinerja menjadi permasalahan dikarenakan oleh proses bisnis kinerja yang belum berorientasi *outcome* dan *impact*, belum melakukan prinsip cascading dan pohon kinerja yang optimal dan belum maksimal melakukan mitigasi risiko. Proses bisnis yang belum berorientasi *outcome* dan *impact* disebabkan oleh belum adanya visi yang kuat untuk diintegrasikan. Kemudian pada permasalahan *cascading* dan pohon kinerja yang belum optimal disebabkan karena kebiasaan aparatur yang masih berpikir parsial. Melanjutkan permasalahan tentang mitigasi risiko yang belum maksimal disebabkan antara kapasitas yang belum memadai atau respons abai pada masalah tersebut. Menginjak ke masalah berikutnya terkait integrasi kerja di temukan masalah pada aspek efisiensi dan aspek inovatif. Terjadinya ketidakefisienan karena pelaksanaannya belum holistik dan belum *crosscutting* dan tidak inovatif ditunjukkan pada perencanaan kinerja yang masih inkremental dan memiliki mentalitas status quo (menolak perubahan). Berikutnya terkait pelaporan kinerja disebabkan karena permasalahan validitas capaian kinerja kurang valid dan pelaporan belum tepat. Terjadinya kurang validnya validitas terjadi karena *self assessment* pada indikator yang masih lemah dan kedalaman pemahaman terkait



definisi operasional yang kurang. Pada permasalahan pelaporan belum tepat disebabkan aparatur baru mampu berorientasi pada pelaksanaan pekerjaan dan keterbatasan waktu dan alokasi dalam melakukan pengukuran. Permasalahan partisipasi publik, permasalahan yang dihadapi adalah kapasitas publik yang masih lemah dan forum partisipasi yang masih bersifat formal. Kapasitas publik yang masih lemah terlihat dari faktor eksternal yaitu representasi keterwakilan dalam partisipasi hanya memperhitungkan status formal dalam masyarakat dan faktor internal kurangnya intensitas pemda dalam menyelenggarakan forum untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya forum partisipatif bersifat formal karena belum semua forum partisipatif menyiapkan mekanisme pasca partisipatif (skema implementasi pada rencana kerja).

c) Budaya Kerja

Problematika dalam urusan budaya kerja organisasi adalah terkait pengorganisasian kerja, penyederhanaan birokrasi, dan penggunaan teknologi. Pada persoalan pengorganisasi kerja hal yang menjadi perhatian adalah sistem yang belum fleksibel dan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama tim serta kelambanan proses. Kemudian terkait pelaksanaan *teamwork* yang belum optimal ditandai oleh masalah belum melakukan proses *agile* dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang selanjutnya lambatnya proses karena masalah SDM yang lamban merespons perkembangan dan juga lamban merespons pekerjaan. Menginjak ke problematika selanjutnya yaitu penyederhanaan birokrasi ditemukan masalah bahwa birokrasi berbasis jabatan fungsional belum optimal karena jabatan fungsional dianggap kurang bergengsi, jabatan fungsional membutuhkan kompetensi khusus dan jenjang karier jabatan fungsional berbasis angka kredit mandiri. Kemudian masalah rentang kendali birokrasi masih berjenjang yang terlihat karena kendali birokrasi masing-masing berdasarkan *eselonering*. Selanjutnya pada penggunaan teknologi masalah yang muncul adalah teknologi administrasi pemerintahan belum berjalan optimal dan pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK. Pada masalah teknologi administrasi pemerintah yang belum optimal dikarenakan oleh sistem yang belum mapan dan kapasitas



SDM yang perlu diperbarui, dan pada masalah pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK adalah masalah pemerintah yang belum optimal mendesiminasikan pada TIK, kapasitas SDM, dan orientasi kerja yang masih manual.

d) Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Permasalahan profesionalitas ASN yang dapat merekam adalah masalah kompetensi teknis, kompetensi *soft skill*/sosiokultural dan manajemen kepegawaian. Kompetensi teknis memiliki cabang permasalahan yaitu pada kualifikasi pendidikan dan kualitas teknis. Pada masalah kualifikasi pendidikan karena jurusan tertentu terlalu banyak namun jurusan teknis terbatas ini disebabkan oleh regulasi formal cenderung umum, izin belajar lebih banyak jurusan umum karena dianggap muda dan kendali izin belajar yang kurang terkendali (*human capital development planning*). Penyebab berikutnya adalah kualitas lulusan tidak selaras dengan kualitas individu karena kecenderungan pada saat kuliah tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan pada saat kuliah orientasi akademik dan cepat lulus dengan standar minimal amat terlihat. Pada masalah kualifikasi teknis terdapat permasalahan peningkatan ketrampilan yang tidak signifikan dan pelaksanaan diklat bersifat formal. Peningkatan keterampilan yang minim kemungkinan disebabkan oleh kapasitas SDM untuk menerima pengetahuan yang kurang dan tidak fokus menjalani pelatihan karena fokus terbagi oleh pekerjaan utama karena SDM memegang posisi vital dalam sebuah urusan. Kemudian pelaksanaan diklat bersifat formal dengan permasalahan SDM pengajar kurang profesional dan metode pembelajaran. Berlanjut ke permasalahan kompetensi *soft skill*/sosiokultural terdapat permasalahan kepemimpinan dan integrasi. Pada permasalahan kepemimpinan terekam beberapa permasalahan antara lain tidak kompeten secara individu, tidak kaderisasi/SDM andalan dan tata kelola/ aktivitas. Pada masalah tidak kompeten secara individu disebabkan oleh rekrutmen yang belum profesional dan kapasitas yang masih rendah. Permasalahan tidak kaderisasi terekam bahwa kurang mampu membuat visi untuk menunjang visi pimpinan di atasnya dan tidak mampu untuk mengarahkan. Selanjutnya terkait tata kelola/ aktivitas terdapat permasalahan SDM umum yang kurang kompeten dan pimpinan



pragmatis agar pekerjaan selesai. Kemudian pada masalah manajemen kepegawaian terdapat cabang masalah antara lain manajemen talenta dan tupoksi lembaga. Pada persoalan manajemen talenta dikarenakan oleh pelaksanaan yang belum optimal karena adanya nepotisme dan distribusi yang belum proporsional dan *talent pool* dilakukan hanya formalitas dilihat dari pengukuran yang tidak transparan dan hasil yang tidak dipatuhi.

e) Digitalisasi Pemerintahan

Tantangan maupun standar yang harus penuh pada isu digitalisasi pemerintahan yaitu pada masalah infrastruktur, keamanan data, pengintegrasian, dan perluasan informasi. Pada masalah infrastruktur yang harus diperhatikan adalah pada masalah perangkat keras dengan masalah sarana prasarana yang terbatas serta persediaan yang belum merata dan perangkat lunak dengan masalah masih ada titik blank spot internet dan masalah kecepatan internet. Kedua tentang keamanan data terdapat masalah kendali akan TIK belum sepenuhnya pada unit yang menaungi terlihat dari kewenangan yang belum tegas diterapkan dan adanya ketidakpercayaan kepada unit pengampu. Kemudian masih pada keamanan data yaitu tentang kompetensi yang masih kurang dilihat dari jumlah expert yang sedikit, kompetensi belum termanfaatkan untuk fokus keamanan data, adanya aparatur yang menangani TIK tidak memiliki kompetensi formal maupun informal terkait TIK, dan adanya aparatur dengan kompetensi TIK namun mendapatkan tugas non TIK. Selanjutnya masalah keamanan data yaitu belum menjadi komitmen pengambil kebijakan dilihat dari pengetahuan terhadap keamanan data yang kurang, orientasi masih di taraf perangkat keras (yang berwujud) dan juga masalah pembiayaan yang cukup tinggi. Ketiga masalah digitalisasi pemerintahan yaitu pengintegrasian yang disebabkan pembangunan sistem masih dilakukan sektoral ini disebabkan oleh adanya kurangnya respons dari unit pengampu sering kali bersifat sektoral dan variabel data yang digunakan berbeda. Keempat masalah perluasan informasi dengan cabang masalah itu proses bisnis diseminasi dan keterbukaan. Pada proses bisnis diseminasi ditemukan bahwa alat yang digunakan masih konvensional dari isi penyajian dan kanal yang digunakan dan belum maksimal frekuensi secara isi dan



rilisnya, selanjutnya terkait proses bisnis keterbukaan ditemukan bahwa pengetahuan terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan masih kurang baik dan juga tentang kemampuan SDM dalam menginformasikan masih membutuhkan improvisasi.

f) Penegakan Hukum

Tantangan dalam penegakan hukum yang perlu menjadi perhatian dimulai dari penetapan regulasi hukum, penetapan regulasi hukum dalam hal ini Peraturan Daerah perlu diharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Perda Provinsi maupun Peraturan Perundangan di tingkat pusat. Tantangan yang lebih mendasar dari pembentukan hukum dalam hal ini peraturan daerah adalah memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk tidak sekedar bersifat mutatis mutandis (sesuai dari peraturan perundangan di atasnya). Tantangan dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain memastikan terdapat inovasi atau pengaturan yang lebih detail dari peraturan perundangan di atasnya. Selain itu dalam melakukan pembentukan hukum dalam hal ini peraturan daerah perlu diperhitungkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya dalam bentuk kapasitas fiskal, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, maupun komitmen implementasinya.

g) Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum telah tertangani, meskipun demikian upaya promotif dan preventif menjadi tantangan untuk terus dilakukan sehingga pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat dilakukan, variasi gangguan ketenteraman dan ketertiban yang perlu mendapat perhatian adalah pencegahan penanganan dan penyelesaian konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tantangan lain dari penegakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah konsistensi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah. Selama ini penindakan terhadap pelanggaran penegakan Peraturan Daerah cenderung dilakukan secara persuasif dan tidak sampai kepada upaya hukum tindak pidana ringan dan pelanggaran sesuai ranah Peraturan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ini



disebabkan antara lain karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki pemerintah daerah tidak lebih dari 5 orang, selain itu patroli penegakan hukum terhadap ketenteraman dan ketertiban umum belum dapat menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah personil dan frekuensi patroli yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi adalah penegakan hukum berupa denda maupun kurungan cenderung dianggap memberatkan masyarakat, dari kondisi yang ada tantangan selanjutnya adalah mengaktifkan komunikasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, simpul-simpul komunitas agar tidak terjadi gesekan antar warga. Secara umum gangguan ketenteraman dan ketertiban umum terjadi karena masyarakat termasuk generasi muda memiliki banyak waktu luang yang tidak termanfaatkan secara produktif, upaya-upaya untuk memberikan ruang ekspresi yang produktif kepada generasi muda maupun yang ekonomis kepada seluruh lapisan masyarakat perlu dilakukan sehingga masyarakat dan generasi muda tidak memiliki waktu untuk melakukan gangguan trantibum. Ketenteraman dan ketertiban umum perlu dijaga agar aktivitas masyarakat yang lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dapat dilakukan secara kondusif.

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang tujuan dan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh individu, organisasi, atau institusi di masa depan. Visi pembangunan daerah jangka menengah kabupaten tegal sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati adalah:

“Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh”
“Tegal Luwih Apik”

Arti Visi:

Maju : Maju adalah kondisi Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang Inovatif, Adil dan Inklusif. Inovatif adalah diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan terus berinovasi secara aktif mendorong, mendukung dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan



berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Sedangkan Adil adalah menjadikan Kabupaten Tegal mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama serta menjadi inklusif dengan melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi.

Tangguh : Tangguh dalam pembangunan yang dimaksud adalah Berketahanan, Konsisten, Berintegritas, Religius dan Berbudaya. Berketahanan yaitu Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai risiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah. Konsisten adalah terus tetap bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan melewati tantangan-tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat. Berintegritas yaitu berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan kejujuran. Religius di mana Kabupaten Tegal berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. Berbudaya yaitu memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya.

Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh “Tegal Luwih Apik”, dengan rincian sebagai berikut:



1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

Misi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, aman, dan berstandar tinggi, diharapkan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah, aksesibilitas pelayanan publik yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Misi ini juga mencakup pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, serta penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

2. Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang stabil, berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat; khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Untuk itu, pertumbuhan didorong untuk berlandaskan pada potensi ekonomi lokal yang ada. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, misi ini juga bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran; baik dengan cara menarik investasi guna menambah kesempatan kerja, ataupun mendorong tumbuhnya wirausaha.

3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup

Misi ini memfokuskan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan dilakukan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misi ini berfokus pada



terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tangguh menghadapi bencana juga menjadi prioritas, guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta faktor kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mendorong produktivitas dan profesionalisme, serta adanya kesehatan dan perekonomian yang baik diharapkan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, etika, dan moral dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkarakter. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, serta pembangunan sosial yang inklusif, misi ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu dan komunitas. Ketahanan sosial diwujudkan melalui peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, ketahanan budaya difokuskan pada pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai identitas dan aset bangsa. Penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta membangun karakter keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.



6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih, dan Efektif

Misi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, bersih, dan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, misi ini mengedepankan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sementara kecepatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk lebih rinci tentang penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada berikut.



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Visi: Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Menguatnya Fondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,60	5,62 – 6,42	6,10-7,10	6,50-7,50	6,90-7,90	7,30-8,10	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,78	72,06	72,34	72,62	72,9	73,18	
			Tingkat Kemiskinan	6,70-6,40	6,60-6,30	6,50-6,20	6,45-6,10	6,41-6,00	6,41-6,00	
Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas			Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	58,12	59,32	61,1	62,99	64,6	65,44
Misi 2: Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0.35	0,84	1,23	1,89	1,95	2,01
				Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	3,95	4,12	4,23	4,35	4,45	4,55
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,25	5,43	5,61	5,73	5,86	5,98
	Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)			5,8	6,16	6,56	7,02	7,55	7,97	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8,30-7,75	7,41-7,27	7,33-7,19	7,25-7,10	7,16-7,02	7,08-6,93
Misi 3: Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,43	75,47	75,51	75,56	75,60	75,65
			Indeks Risiko Bencana	110,38	107,07	103,85	100,74	97,72	94,78
Misi 4: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	0,611	0,612	0,613	0,614	0,615	0,616
			Indeks Kesehatan	0,836	0,838	0,840	0,842	0,844	0,846
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	84,03	84,44	84,81	85,11	85,54	85,97
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	62,84	62,94	63,04	63,14	63,24	63,34
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83,2	83,66	84,12	84,58	85,05	85,05
Misi 6: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif		Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	84,56	86,06	87,56	89,06	90,56	92,06

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2025



C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada penjabaran misi pembangunan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini merupakan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal yang dijabarkan dari misi.

- 1) Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas, melalui fokus kebijakan:
 - a) Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
 - b) Pemerataan akses infrastruktur dasar
 - c) Fasilitasi penyediaan hunian layak
 - d) Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
 - e) Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
 - f) Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
 - g) Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur
- 2) Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan, melalui fokus kebijakan:
 - a) Peningkatan produksi pertanian
 - b) Hilirisasi dan mekanisasi pertanian
 - c) Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
 - d) Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - e) Revitalisasi pasar rakyat
 - f) Pengembangan destinasi wisata
- 3) Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja, melalui fokus kebijakan:
 - a) Peningkatan kualitas tenaga kerja
 - b) Penciptaan lapangan kerja baru
 - c) Peningkatan investasi
 - d) Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah
- 4) Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana, melalui fokus kebijakan:



- a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b) Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
 - c) Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - d) Peningkatan kesiapsiagaan bencana
- 5) Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat, melalui fokus kebijakan:
- a) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
 - b) Peningkatan kegemaran membaca masyarakat
 - c) Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*
 - d) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
 - e) Peningkatan Prestasi Olahraga
- 6) Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal, melalui fokus kebijakan:
- a) Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan
 - b) Pemajuan desa bangga budaya
- 7) Penguatan pembangunan gender dan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga, melalui fokus kebijakan:
- a) Meningkatnya Pembedayaan Gender
 - b) Menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak
 - c) Meningkatnya pemenuhan hak anak
 - d) Terkendalinya jumlah penduduk
 - e) Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
 - f) Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat
- 8) Optimalisasi stabilitas wilayah, melalui fokus kebijakan:
- a) Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b) Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
- 9) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi, melalui fokus kebijakan:
- a) Fasilitasi Kemudahan Perizinan
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - c) Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
 - e) Meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan
 - f) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - g) Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
 - h) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah



- i) Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah
- j) Digitalisasi layanan publik pemerintahan
- k) Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan pembangunan Kabupaten Tegal berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2025 fokus pada 9 prioritas sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing;
3. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran;
4. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
5. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
6. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan;
7. Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas;
8. Meningkatnya kerukunan umat beragama; dan
9. Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan.

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah. Kemampuan daerah, baik dari sumber daya aparatur, kelembagaan maupun keuangan, masih relatif terbatas. Ketidakmerataan kemampuan daerah juga menyebabkan kesenjangan antar daerah dalam melaksanakan urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Pusat merasa perlu untuk menyusun satu standar baku pelaksanaan urusan wajib dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tolok ukur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, sosial serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang didapatkan oleh warga negara secara



minimal, berisi indikator-indikator yang menjadi panduan daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar secara minimal kepada warga negara.

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM di Daerah, harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalam laporan Penerapan SPM ini berisi rencana penerapan SPM, tahapan penerapan, realisasi pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi kendala agar tidak terjadi di tahun mendatang.

Dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; dan
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Guna menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Selanjutnya SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sehingga dokumen-dokumen perencanaan turunan dari RPJMD juga telah memuat program kegiatan dan rencana anggaran penerapan SPM, dari mulai Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD) hingga Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Dalam RPJMD, SPM menjadi salah satu dokumen yang menjadi referensi. Pada Bab I Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digambarkan keterkaitan antar dokumen, salah satunya SPM. SPM menjadi referensi dalam penyusunan indikator program dan indikator sasaran. Program-program pada Perangkat Daerah Wajib Pelayanan Dasar diarahkan selaras dengan SPM atau menuju pencapaian indikator SPM. Sehingga 6 jenis urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota telah diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029.

Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka perlu juga disusun fokus atau tema pembangunan tahunan sebagai dasar menentukan prioritas arah kebijakan tahunan sebagai berikut :

- Arah Kebijakan Tahun Pertama (2026)
Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2026 adalah “TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR DASAR, DAYA SAING EKONOMI BERKELANJUTAN DAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHAN GUNA Mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
- Arah Kebijakan Tahun Kedua (2027)
Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2027 adalah “AKSELERASI INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, serta Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah”.
- Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2028)
Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2028 adalah “PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK Mengoptimalkan Potensi Desa dan mewujudkan Industri Hijau”.
- Arah Kebijakan Tahun Keempat (2029)
Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2029 adalah “OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR UNTUK Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
- Arah Kebijakan Tahun Kelima (2030)



Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2030 adalah “INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN SEBAGAI PERWUJUDAN MASYARAKAT MAJU DAN TANGGUH”.

Arah kebijakan RPJMD 2025-2029 disusun guna dapat memecahkan masalah dari suatu masalah pokok, sehingga perlu disusun suatu tahapan pelaksanaan arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 antara lain:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang merata, dengan program prioritas pada:
 - a) program penyelenggaraan jalan;
 - b) program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - c) program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
- 2) Penanganan rumah tidak layak huni warga miskin, dengan program prioritas pada program kawasan permukiman.
- 3) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas, serta bantuan bagi petani dan nelayan, dengan program prioritas pada:
 - a) program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b) program penanganan kerawanan pangan;
 - c) program pengelolaan perikanan tangkap; dan
 - d) program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- 4) Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, diantaranya industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, dengan program prioritas pada:
 - a) program perencanaan dan pembangunan industri;
 - b) program pengembangan UMKM; dan
 - c) program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemajuan wirausaha serta *Link and Match* tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, dengan program prioritas pada:
 - a) program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - b) program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - c) program penempatan tenaga kerja.
- 6) Konservasi lingkungan hidup, khususnya daerah resapan air, dan pengelolaan sampah yang terpadu, dengan program prioritas pada:
 - a) program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan



- b) program pengelolaan persampahan;
- 7) Peningkatan kualitas masyarakat dengan penguatan pendidikan dan keterampilan, dengan program prioritas pada program pengelolaan pendidikan.
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan program prioritas pada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- 9) Pemajuan desa bangga budaya, dengan program prioritas pada program pengembangan kebudayaan.
- 10) Adanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi keluarga miskin, dengan program prioritas pada program perlindungan dan jaminan sosial.
- 11) Digitalisasi layanan publik pemerintahan, dengan program prioritas pada:
 - a) program informasi dan komunikasi publik; dan
 - b) program penunjang urusan pemerintah.
- 12) Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan program prioritas pada program riset dan inovasi daerah.



Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Tema/Fokus:	Tema/Fokus:	Tema/Fokus:	Tema/Fokus:	Tema/Fokus:
Transformasi infrastruktur dasar, daya saing ekonomi berkelanjutan dan kualitas layanan pemerintahan guna mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional	Akselerasi infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah	Pemantapan infrastruktur dasar untuk mengoptimalkan potensi desa dan mewujudkan industri hijau	Optimalisasi infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah	Infrastruktur berkelanjutan sebagai perwujudan masyarakat maju dan tangguh
Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:
1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektivitas wilayah yang berkualitas
2. Pembangunan adalah pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	2. Pembangunan adalah pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	2. Pembangunan adalah pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	2. Pembangunan adalah pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	2. Pembangunan adalah pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan
3. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	3. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	3. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	3. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	3. Perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing tenaga kerja



TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana
5. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	5. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	5. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	5. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat	5. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
6. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal	6. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal	6. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal	6. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal	6. Optimalisasi pelestarian budaya serta kearifan lokal
7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga	7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga
8. Optimalisasi stabilitas wilayah	8. Optimalisasi stabilitas wilayah	8. Optimalisasi stabilitas wilayah	8. Optimalisasi stabilitas wilayah	8. Optimalisasi stabilitas wilayah
9. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi	9. Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan	9. Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan	9. Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan	9. Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan



BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tegal Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,7	72,36	0,92
2.	Angka Kemiskinan	6,81%	6,16 %	-9,55
3.	Angka Pengangguran	7,53%	7,61%	0,08
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	5,97%	17,75
5.	Pendapatan Per kapita ADHK (ribu)	17.585,33	18.422,04	4,75
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,329	0,330	0,001

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2026

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Tegal tercatat sebesar 71,70, kemudian meningkat menjadi 72,36 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 0,66 poin ini mencerminkan adanya perbaikan pada beberapa dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pada dimensi kesehatan, yang diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH), terjadi peningkatan dari 74,25 tahun pada tahun 2024 menjadi 74,62 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta meningkatnya kualitas layanan kesehatan.

Pada dimensi pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami sedikit peningkatan dari 12,96 tahun pada tahun 2024 menjadi 12,97 tahun pada tahun 2025. Namun demikian, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami penurunan dari 7,36 tahun pada tahun 2024 menjadi 7,27 tahun pada tahun 2025, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan capaian pendidikan penduduk usia dewasa.

Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, terjadi peningkatan dari Rp10,972 juta pada tahun 2024 menjadi Rp11,498 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat.



Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Tegal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia terus mengalami kemajuan. Namun demikian, perhatian lebih masih diperlukan terutama pada peningkatan capaian pendidikan masyarakat agar pembangunan manusia dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Secara persentase, penduduk miskin mengalami penurunan dari 6,81 persen pada tahun 2024 menjadi 6,16 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi jumlah absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 98,02 ribu orang penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut kemudian menurun sebanyak 9,32 ribu orang sehingga pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin menjadi 88,70 ribu orang.

Penurunan baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tetap perlu terus diperkuat melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sumber-sumber ekonomi produktif.

c. Angka Pengangguran

Secara keseluruhan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tegal pada Agustus 2025 tercatat sebesar 7,61 persen. Angka ini sedikit meningkat sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar 7,53 persen.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tegal. Meskipun peningkatannya relatif kecil, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian karena menggambarkan adanya tambahan angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap di pasar kerja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas kesempatan kerja melalui penguatan sektor-sektor ekonomi produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Tegal tumbuh sebesar 5,07 persen, kemudian meningkat menjadi 5,97 persen pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,90 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan semakin membaiknya aktivitas ekonomi di berbagai sektor di Kabupaten Tegal. Kinerja tersebut dapat didorong oleh meningkatnya produksi dan aktivitas usaha, konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta kontribusi berbagai sektor ekonomi yang semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan daerah.

Secara keseluruhan, akselerasi pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tegal berada pada jalur yang positif. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

e. Pendapatan Per kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tegal pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Tegal tercatat sebesar 17.585,33, kemudian meningkat menjadi 18.422,04 pada tahun 2025.

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan nilai tambah per penduduk secara riil, karena telah memperhitungkan pengaruh inflasi. Peningkatan PDRB per kapita ini mencerminkan bahwa secara rata-rata tingkat aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat di Kabupaten Tegal mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meningkatnya PDRB per kapita ADHK ini menjadi indikasi positif bagi perkembangan ekonomi daerah, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kapasitas ekonomi Kabupaten Tegal secara berkelanjutan.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Gini Rasio pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2024, nilai Gini Rasio Kabupaten Tegal tercatat sebesar 0,329, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,330 pada tahun 2025.

Kenaikan sebesar 0,001 poin tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat relatif tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Gini Rasio yang masih berada pada kisaran 0,3 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kabupaten Tegal masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Meskipun perubahannya sangat kecil, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ketimpangan di daerah.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	81,2688361	DINAS DIKBUD
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	80,6088716	DINAS DIKBUD
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,1058016	DINAS DIKBUD
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	30,2966841	DINAS DIKBUD
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	31,516184	DINAS DIKBUD



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
2.	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0,0216111	DINAS KESEHATAN
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16,116518	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	99,7622778	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,0589501	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	96,3546643	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	94,2080703	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	96,7323574	DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	100	DINAS KESEHATAN
3.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINAS SOSIAL
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINAS SOSIAL
		Persentase lanjut usia	100	DINAS SOSIAL



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	DINAS SOSIAL
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	DINAS SOSIAL
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	2,3664914	DINAS SOSIAL
4.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	66,6666667	BPBD
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	SATPOL PP
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	SATPOL PP
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	71,2643678	SATPOL PP
5.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	DINAS PERKIM
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	85	DINAS PERKIM
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang	2,2100309	DINAS PERKIM



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tertangani		
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100	DINAS PERKIM
6.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi	DINAS PUPR
		Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	66,6276593	DINAS PUPR
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	75,9971755	DINAS PUPR
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,008443	DINAS PUPR
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	-	DINAS PUPR
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	-	DINAS PUPR
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100	DINAS PUPR
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100	DINAS PUPR
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	31,122449	DINAS PUPR
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100	DINAS PUPR
7.	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang	12,1212121	DINAS DIKBUD



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dilestarikan		
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	24,1210431	DINAS DIKBUD
8.	Kepemudaan dan olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	34,5	DINAS PORAPAR
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,08759	DINAS PORAPAR
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	-	DINAS PORAPAR
		Persentase jumlah atlet berprestasi	94,4444444	DINAS PORAPAR
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	15,5172414	DINAS P3AP2KB
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	DINAS P3AP2KB
10.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	97,4315498	DINAS DUKCAPIL
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40,8959847	DINAS DUKCAPIL
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	DINAS DUKCAPIL
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,8960473	DINAS DUKCAPIL
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DINAS DUKCAPIL
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DINAS DUKCAPIL
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DINAS DUKCAPIL
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	60	DINAS PERMASDES
		Persentase peningkatan status desa mandiri	21,2121212	DINAS PERMASDES
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	70,1067616	DINAS PERMASDES



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
12.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	70,3830456	DINAS PMPTSP
		Realisasi total terhadap target investasi	135,8462073	DINAS PMPTSP
13.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	1,9484933	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	100	DINAS KOP,UKM, PERDAGANGAN
14.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	0,4300235	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	DINAS PERINTRANSNAKER
15.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	35,3658537	DINAS KOMINFO
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	87,5816993	DINAS KOMINFO
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	85,8999261	DINAS KOMINFO
16.	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	46,5147453	DINAS KOMINFO
17.	Persandian	Persentase tingkat	45,4248366	DINAS KOMINFO



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah		
18.	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	99,6779628	DINAS PERKIM
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	100	DINAS PUPR
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati dikarenakan belum mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN.	DINAS PUPR
19.	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,96	DINAS PERHUBUNGAN
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,372	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100	DINAS PERHUBUNGAN
20.	Lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	70,8333333	DINAS LH
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44,3513451	DINAS LH
21.	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18,544673	DINAS KPTAN
22.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	56,71	DINAS PERPUSIP
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	6	DINAS PERPUSIP
23.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	79,59	DINAS PERPUSIP



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		
24.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	103,7209302	DINAS P3AP2KB
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	64,8194521	DINAS P3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	88,3419689	DINAS P3AP2KB
25.	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	17,3061827	DINAS PORAPAR
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	368,4210526	DINAS PORAPAR
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	0,1484593	DINAS PORAPAR
26.	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	81,7	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	3,6002939	DINAS PERINTRANSNAKER
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	6,7869753	DINAS PERINTRANSNAKER
		Persentase realisasi investasi sektor industri	61,3261869	DINAS PERINTRANSNAKER



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor		
27.	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	62,3844089	
28.	Energi dan sumber daya mineral	-	-	-
29.	Transmigrasi	-	-	-
30.	Kehutanan	-	-	-
31.	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	7,5274804	DINAS KPTAN
		Peningkatan produksi hortikultura	24,423756	DINAS KPTAN
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	2,3463467	DINAS KPTAN
		"Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan	100	DINAS KPTAN
32.	Kelautan dan perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	12,63	DINAS PERIKANAN
		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	102,5434482	DINAS PERIKANAN

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
1.	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	BPKAD
2.	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	29,319492	BPKAD
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	23,5246861	BPKAD
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	63,6854522	
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	37,4791995	BPKAD
3.	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	66,5684831	BKPSDM
4.	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	INSPEKTORAT



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	-	INSPEKTORAT
		Manajemen risiko Indeks	2	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	94,9622166	INSPEKTORAT
5.	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	SETDA
		Pemanfaatan sistem pengadaan	20,28	SETDA
6.	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1	BPKAD
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	14,2857143	SEKRETARIAT DPRD
7.	Pelayanan publik	Penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik	79,54	SETDA
8.	Penelitian dan pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	85,1851852	BAPERIDA

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan pembangunan daerah dari RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026 menuju RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029. Pada awal tahun anggaran 2025, Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal masih mengacu pada RPD. Selanjutnya setelah RPJMD ditetapkan, dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah agar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Penyesuaian tersebut tidak mengubah arah pembangunan secara substantif, melainkan lebih pada penyempurnaan redaksi tujuan pembangunan serta penguatan fokus pembangunan daerah agar lebih selaras dengan agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berikut tabel perbandingan:

Perbandingan RPD 2025-2026 dan RPJMD 2025-2029

RPD 2025-2026				RPJMD 2025-2029			
Visi Misi	No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Visi	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Daerah
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	1	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Menuju Kabupaten Tegal Maju dan	Menguatnya Fondasi Pembangunan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi



RPD 2025-2026				RPJMD 2025-2029			
Visi Misi	No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Visi	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Daerah
tidak menerjemahkan visi misi Kepala Daerah namun menerjemahkan isu dan permasalahan Daerah menjadi Tujuan dan Sasaran pembangunan dengan memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah		budaya anti korupsi dalam pemerintahan		Tangguh	Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh		
	2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3	Tingkat Kemiskinan
				Misi	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Daerah
	3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	1	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas
	4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	2	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
						3	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)
	5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit			4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)
	6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	5	Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
	7	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap		6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	
			Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak				
	8	Meningkatnya Kinerja Perhubungan	Indeks Kinerja Perhubungan	Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8			Indeks Risiko Bencana	
10	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	9	Indeks Pendidikan	
11	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian			10	Indeks Kesehatan	
12	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	11	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
13	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten		Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	12	Indeks Pembangunan Keluarga	
14	Meningkatnya Produktivitas di Sektor	Laju PDRB Sektor Perdagangan		Meningkatnya Kerukunan Umat	13	Indeks Kerukunan Umat	



RPD 2025-2026				RPJMD 2025-2029			
Visi Misi	No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Visi	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Daerah
		Perdagangan			Beragama		Beragama
	15	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif	Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	14	Indeks Reformasi Birokrasi
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	17	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender				
	18	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan				
	19	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan				
	20	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin				
	20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan				
			Indeks Keparahan Kemiskinan				
	21	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	22	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan				
	23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan				
	24	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah				
	25	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana				
	26	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
	27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan				

Berdasarkan data pada di atas perbandingan RPD Tahun 2025–2026 dan RPJMD Tahun 2025–2029, perubahan yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukkan adanya penyelarasan arah pembangunan daerah dengan visi kepala daerah. Meskipun demikian, substansi tujuan pembangunan tetap



konsisten dan selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal diukur melalui 31 indikator kinerja utama yang mendukung 27 sasaran strategis dan 8 tujuan pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan.	Indeks Reformasi Birokrasi	68,05	83,06	126	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,45	3,97	115	Sangat tinggi
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,54	86,48	105	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	65,15	65,88	101	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah.	Indeks Sistem Merit	0,75	0,66	88	Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	79,22	81,36 (n-1)	102	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya	Persentase	84,23	64,84	77	Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap				
		Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	78,14	81,3	104	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kinerja Perhubungan	Indeks Kinerja Perhubungan	55,00	59	107	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,82	72,29	108	Sangat Tinggi
10	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,97	107	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,33	2,88	123,6	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	4,65	5,51	118,4	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	7,50	4,52	60	Sedang
14	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	3,15	5,88	186,6	Sangat Tinggi
15	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	72,36	101	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,12	88,72 (n-1)	99	Sangat Tinggi
17	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,310	0,315 (n-1)	101	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,620	0,606	98	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya	Indeks Kesehatan	0,835	0,84	101	Sangat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat					Tinggi
20	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,85	6,16	110	Sangat Tinggi
20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,78	0,73	106	Sangat Tinggi
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,15	0,12	120	Sangat Tinggi
21	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,40	7,62	109	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	87,55	92,78	106	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	87,86	93,53	106	Sangat Tinggi
24	Menurunnya risiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,89	0,83	93	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	0,79	0,80	101	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.	65,15	65,50	101	Sangat Tinggi
27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	69,65	84,34 (n-1)	121	Sangat Tinggi



C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	2025			2024			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68,05	83,06	126%	8,91	82,48	104,5	68,31	77.6	113,60
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,45	3,97	137%	3,5	3,16	90,2	3,2	3,07	95,94
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,54	86,48	105%	86,2	86,38	100,2	84,83	85,26	100,50
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	65,15	65,88	101%	3,61	65,58	89	65,21	64,25	98,53
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*	100	WTP	WTP*	100
5	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	0,75	0,66	88%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	79,22	81,36 (n-1)	102%	1,36	82,98	101,9	80,04	80,46	100,52
7	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	84,23	64,84	77%	,89	87,51	104	82,12	82,36	104,51
		Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	78,14	81,3	104%	9,15	85,30	107	78,02	78,02	100%
8	Meningkatnya Kinerja Perhubungan	Indeks Kinerja Perhubungan	55,00	59	107%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,82	72,29	108%	5,83	61,94	94,09	65,03	66,80	120,40
10	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,97	107%	,2-5,5	4,97	95,5	4,2 – 5,2	4,93	117,3
11	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,33	2,88	123,6 %	95-3,35	0,29	0	2,78 – 3,46	-2,04	0



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	2025			2024			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	4,65	5,51	118,4	3,75-5,23	3,87	100	2,72 – 3,68	5,10	138,59
13	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	7,50	4,52	60%	12,5	4,91	39,28	2,23	13,77	593,53
14	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	3,15	5,88	186,6 %	4,5-5,65	6,62	117	2,95 – 4,48	5,05	128,82
15	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	72,36	101%	71	71,7	100,9	70,13	71,12	101,41
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,12	88,72 (n-1)	99%	88,5	88,64*	100,16	88,89	88,22 (n-1)	99,25
17	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,310	0,315 (n-1)	101,61 %	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,620	0,606	98%	0,60	0,61	101	0,61	0,61	100
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,835	0,84	101%	0,804	0,835	103	0,802	0,85	105,9
20	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,85	6,16	110%	7,8-71	6,81	101	7,8 – 7,6	7,30	106,4
20	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,78	0,73	106%	0,78	0,97	75,64	0,82	0,88	92,68
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,15	0,12	120%	0,10	0,22	20	0,12	0,17	58,33
21	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,40	7,62	109%	9,64-9,4	7,53	11	9,64 – 9,45	8,60	100
22	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	87,55	92,78	106%	0,66	92,58	102,55	88,66	89,38	100,81
23	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	87,86	93,53	106%	90,66	93,38	103	87,66	89,38	100,81
24	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulanga n Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,89	0,83	93%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan	Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulanga n Bencana	0,79	0,80	101%	NA	NA	NA	NA	NA	NA



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	2025			2024			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Bencana										
26	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	65,15	65,50	101%	73,69	83,93	113,	63,16	64,61	102,30
27	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	69,65	84,34*	121,09 %	79,45	84,34	106,15	70,5	78,16	110,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 serta memperlihatkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana tercermin pada tabel perbandingan capaian kinerja. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

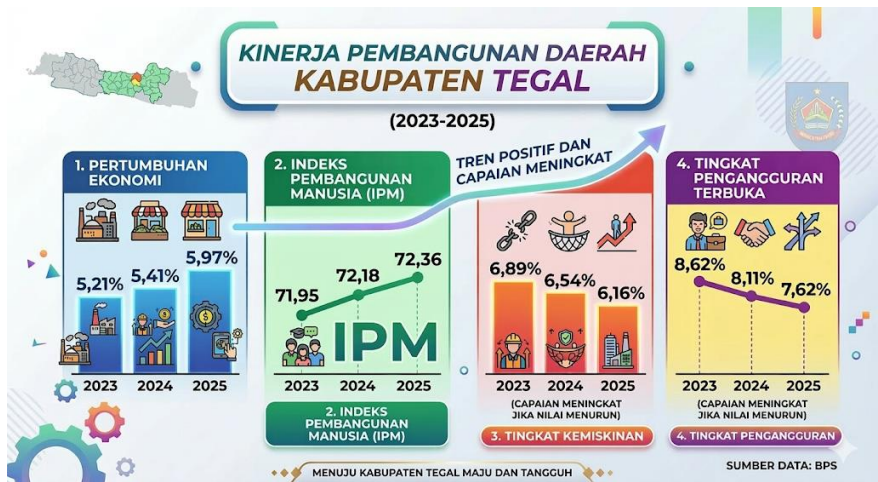
Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, serta pertumbuhan sektor perdagangan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, percepatan transformasi digital pemerintahan, perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatnya dinamika aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal, khususnya pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun struktural, seperti anomali iklim, dinamika perekonomian nasional, serta perubahan struktur pendapatan daerah.

Selain diukur melalui indikator kinerja utama, kinerja pembangunan daerah juga dapat dilihat melalui perkembangan indikator makro pembangunan daerah yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.



Kinerja Pembangunan Daerah



Berdasarkan data info grafis, indikator makro ekonomi Kabupaten Tegal periode 2023–2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Pertama, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami akselerasi yang signifikan, meningkat dari 5,21% pada tahun 2023 menjadi proyeksi 5,97% pada tahun 2025. Tren kenaikan ini (yang ditandai dengan garis biru menanjak) menjadi sinyal kuat pulih dan membaiknya kondisi perekonomian daerah, yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor industri.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup masyarakat juga terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) konsisten merangkak naik dari 71,95 pada tahun 2023 menjadi 72,36 pada tahun 2025. Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta daya beli (standar hidup layak).

Keberhasilan pembangunan juga terlihat jelas dari dua indikator sosial utama lainnya yang trennya menurun (capaian berbanding terbalik dengan nilai). Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 6,89% pada tahun 2023 menjadi 6,16% pada tahun 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan perbaikan yang berarti, menurun dari 8,62% menjadi 7,62% pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, analisis gabungan dari keempat indikator ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal telah berjalan secara inklusif. Berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan tidak hanya memacu ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal menuju visi "Maju dan Tangguh".



D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Hasil Pembangunan Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah yang memiliki karakteristik khusus, seiring dengan pelantikan kepala daerah baru dan penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 pada bulan Agustus 2025. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2025, pelaksanaan kinerja daerah masih mengacu pada RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024. Selanjutnya, mulai Agustus 2025, arah pembangunan dan target kinerja disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Kondisi tersebut menyebabkan capaian kinerja tahun 2025 perlu dibaca dalam konteks kesinambungan antara target yang ditetapkan pada awal tahun berdasarkan RPD dan penyesuaian sasaran strategis setelah ditetapkannya RPJMD. Dengan demikian, analisis capaian kinerja pada bagian ini menegaskan kontribusi capaian tahun berjalan terhadap sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang baru.

Perbandingan Target Kinerja Masa Transisi

No.	Indikator	RPD 2025-2026	RPJMD 2025-2029	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,00 – 5,60	Disesuaikan
2	IPM	72,22	71,78	Penyesuaian Sasaran
3	Kemiskinan	6,85	6,70 – 6,40	Prioritas Baru

Realisasi Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Menguatnya Fondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,0-5,6	5,97	106,6%
	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin; Tahunan	71,78	72,36	100,8%
	3	Tingkat Kemiskinan	Persen; Tahunan	6,7-6,4	6,16	103,7%



Perbandingan Capaian Kinerja 2023-2025

No.	Indikator kinerja Utama	2025			2024			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,97	107%	,2-5,5	4,97	95,5	4,2 –5,2	4,93	117,3
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,22	72,36	101%	71	71,7	100,9	70,13	71,12	101,41
3	Tingkat Kemiskinan	6,85	6,16	110%	7,8-71	6,81	101	7,8 –7,6	7,30	106,4

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dokumen Perencanaan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2023	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPJMD 25-29	% Capaian Terhadap Target RPJMD 25-29
					Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	117,3	95,5	5,0-5,6	5,97	106,6%	7,30-8,10	73,7%
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin; Tahunan	101,41	100,9	71,78	72,36	100,8%	73,18	98,8%
3.	Tingkat Kemiskinan	Persen; Tahunan	106,4	101	6,7-6,4	6,16	103,7%	6,41-6,00	97,3%

Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Menguatnya Fondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,97	107%	24.164.360.810	22.049.814.304	91,25	17,26
	Indeks Pembangunan Manusia	72,22	72,36	101%	413.442.782.332	391.252.757.613	94,63	5,67
	Tingkat Kemiskinan	6,85	6,16	110%	27.853.286.468	27.002.468.854	96,94	13,47

Secara keseluruhan berdasarkan tabel capaian kinerja yang tersaji diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Tegal tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif dalam memenuhi target, tetapi juga merefleksikan kualitas transformasi pembangunan yang cukup solid di tengah perubahan kerangka perencanaan. Seluruh indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan tidak sekadar melampaui target tahunan, namun juga menunjukkan konsistensi tren perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi



kebijakan yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat dan memiliki daya ungkit yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan target akhir RPJMD 2025–2029, capaian tahun 2025 memperlihatkan posisi awal yang relatif kuat, khususnya pada indikator IPM dan kemiskinan yang telah mendekati target jangka menengah (masing-masing 98,8% dan 97,3%). Ini berarti, dengan menjaga konsistensi kebijakan, kedua indikator tersebut berpotensi mencapai atau bahkan melampaui target lebih cepat dari yang direncanakan. Namun demikian, pada indikator pertumbuhan ekonomi, meskipun telah melampaui target tahunan, capaian terhadap target RPJMD masih berada pada kisaran 73,7%, yang mengindikasikan perlunya akselerasi yang lebih terarah pada sektor-sektor produktif agar mampu mengejar target jangka menengah yang lebih ambisius.

Dari perspektif efisiensi, terdapat indikasi kuat bahwa kinerja tinggi dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal, bahkan cenderung hemat. Tingkat serapan anggaran yang tidak mencapai 100%, namun tetap menghasilkan capaian kinerja di atas target, menunjukkan adanya efisiensi teknis dalam pelaksanaan program. Akan tetapi, kondisi ini juga perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan bahwa efisiensi tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan produktivitas, bukan akibat adanya kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana atau ruang fiskal yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa fondasi pembangunan Kabupaten Tegal pada awal periode RPJMD telah berada pada posisi yang cukup kuat, baik dari sisi capaian *outcome* maupun tata kelola sumber daya. Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan tren positif tersebut, tetapi juga mengoptimalkan ruang percepatan, khususnya pada sektor pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa efisiensi anggaran terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dan dampak pembangunan secara berkelanjutan.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 menunjukkan keterkaitan yang positif antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis. Hasil perhitungan pada tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran mampu mencapai target kinerja dengan tingkat penggunaan anggaran yang efisien.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan hasil yang optimal terhadap sasaran pembangunan

daerah, sehingga penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan proporsional.

Secara metodologis, tingkat efisiensi dihitung melalui perbandingan antara persentase capaian kinerja dan persentase realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis. Nilai efisiensi yang positif menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sedangkan nilai efisiensi yang negatif menunjukkan bahwa realisasi anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan. Dengan demikian, tabel berikut memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada setiap sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Penetapan Anggaran / Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi	122,06	97,88	552.602.541.590,00 / 540.789.156.457,00	24,7	Sangat efisien
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar berwawasan lingkungan	102	94,98	344.101.503.806,00 / 326.758.291.453,00	12,6	Efisien
3	Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis potensi lokal	107	91,25	24.164.360.810,00 / 22.049.814.304,00	17,26	Efisien
4	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas	101	94,63	413.442.782.332,00 / 391.252.757.613,00	5,6	Cukup efisien
5	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	110	96,94	27.853.286.468,00 / 27.002.468.854,00	113,47	Efisien
6	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	106	64,48	2.408.121.775,00 / 1.552.787.709,00	64,39	Sangat Efisien
7	Menurunkan risiko bencana	93	02,29	1.259.028.675,00 / 1.162.034.078,00	-7,8	Kurang Efisien
8	Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan	101	80,88	1.742.663.707,00 / 1.409.513.454,00	24,87	Sangat Efisien

Keterangan kategori:
Sangat Efisien (>20%) | Efisien (10–20%) | Cukup Efisien (0–10%) | Kurang Efisien (<0%)

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sasaran strategis menunjukkan nilai efisiensi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 secara umum telah dihasilkan melalui pemanfaatan anggaran yang efisien.



Pada beberapa sasaran, capaian kinerja yang tinggi disertai dengan tingkat efisiensi yang baik, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan perhatian, khususnya pada indikator yang capaian kinerjanya belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis telah tercapai dengan tren yang positif dan didukung oleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

Meskipun demikian, beberapa indikator strategis masih memerlukan percepatan dan penguatan intervensi program, khususnya pada sektor yang masih menunjukkan kesenjangan terhadap target akhir RPJMD. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan penetapan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya agar capaian kinerja dapat semakin optimal dan berkelanjutan.

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

- 1. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan yang baik dan bersih.

Capaian pada tujuan ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya beberapa indikator utama, seperti nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Kepuasan Masyarakat, serta nilai SAKIP daerah.

Peningkatan indikator dimaksud menunjukkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi kualitas perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian Kinerja Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Anti Korupsi dalam Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	104,5	68,05	83,06	122,06%	68,35	121%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100,1	82,54	86,48	104,07%	83,15	104%



3.	Indeks SPBE	Angka	90	3,45	3,97	115,07%	3,55	118%
4.	Nilai SAKIP	Angka	89	65,15	65,88	101,12%	66,35	99,3%
5.	Opini BPK	Opini	100	WTP	WTP	100%	WTP	100%
6.	Indeks Sistem Merit	Angka	NA	0,75	0,66*	88%	0,80	82,5%
Rata-rata capaian Kinerja			94,78%			101,66%		100,76%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian tujuan Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tegal pada tahun 2025 (n-1) mencapai 83,06 dari target sebesar 68,05, atau sebesar 122,06% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal telah berjalan secara efektif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pada tabel pengukuran kinerja sasaran, rata-rata capaian indikator pada tujuan ini mencapai 101,66% dengan kategori Sangat Tinggi. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang melampaui target, antara lain Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 115,07%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 104,07%, serta Nilai SAKIP sebesar 101,12%. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah, baik dalam aspek pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja, maupun pengelolaan keuangan daerah. Penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja juga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, indikator Indeks Sistem Merit belum sepenuhnya mencapai target dengan capaian sebesar 88%. Kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan hasil penilaian sistem merit tahun sebelumnya sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi implementasi sistem merit pada tahun berjalan. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah berada pada kategori Tinggi, terutama dalam aspek pengembangan kompetensi aparatur dan penguatan manajemen talenta.

Jika dilihat dari tren beberapa tahun terakhir, indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai SPBE meningkat dari 2,55 pada tahun 2021 menjadi 3,97 pada tahun 2025, sementara Nilai SAKIP meningkat dari 62,56 menjadi 65,88 pada periode yang sama. Tren peningkatan



tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan manajemen kinerja pemerintah daerah.

Perbandingan Capaian Kinerja Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Anti Korupsi dalam Pemerintahan yang Baik dan Bersih

NO	URAIAN IKU	SATUAN	REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.55	3.07	3.07	3,16	3,97
2.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82,2	81,38	85,26	86,38	86,48
3.	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	62,56	63,26	64,25	65,58	65,88
4.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP*	WTP
5.	Indeks Sistem Merit	Angka	0,27	0,58	0,66	0,66	0,66*

Keberhasilan capaian tujuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Meskipun capaian kinerja pada tujuan ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik, beberapa hal masih perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan, antara lain penguatan implementasi sistem merit secara lebih optimal, peningkatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

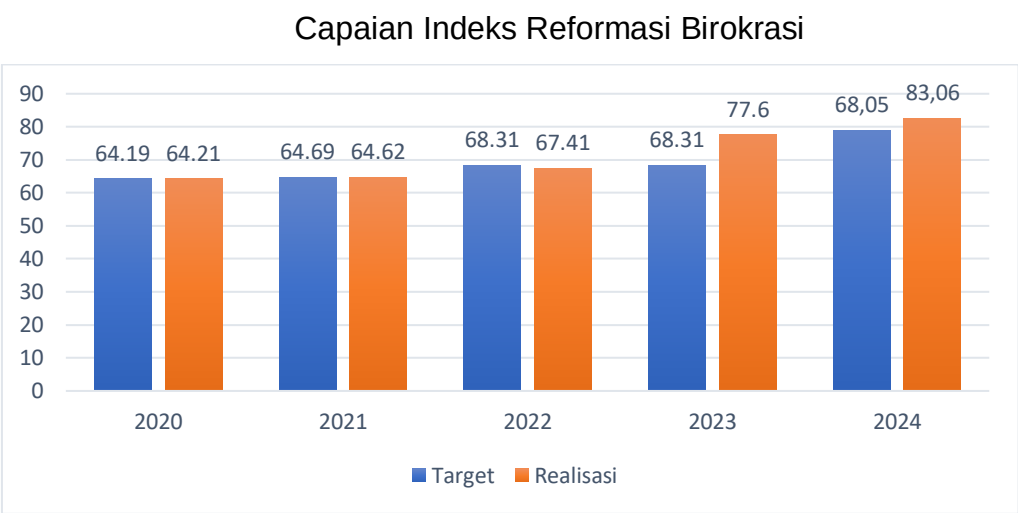
Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melakukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital guna meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian berbagai indikator tata kelola pemerintahan tersebut merupakan bagian dari komponen penilaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peningkatan nilai SPBE, kualitas pelayanan publik yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat, penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui peningkatan nilai SAKIP, konsistensi opini WTP atas laporan keuangan daerah, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN



secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik/tabel berikut



Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tegal mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 64,21 pada tahun 2020 menjadi 83,06 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya penguatan implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur dasar yang memadai dan berkelanjutan berperan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan aksesibilitas layanan publik, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian tujuan Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan menunjukkan kinerja yang baik. Dari lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tujuan ini, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah



dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas jaringan jalan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.

Selain itu, indikator Indeks Kinerja Perhubungan juga menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan kinerja sektor perhubungan mencerminkan semakin baiknya pengelolaan sistem transportasi daerah, baik dari sisi konektivitas jaringan transportasi, pengaturan lalu lintas, maupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.

Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian menunjukkan kinerja yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pengelolaan lingkungan hidup mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Tegal.

Namun demikian indikator Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur serta tingginya kebutuhan peningkatan kualitas jaringan jalan di beberapa wilayah.

Capaian Kinerja Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Angka	101,99	79,22	82,98*	102%	84,7	98%
2.	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	%	104	84,23	64,84	77%	86,68	75%
3.	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	107	78,14	81,3	104%	85,49	95%
4.	Indeks Kinerja Perhubungan	Angka	NA	55,00	59	107%	57	104%
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	94,09	66,82	72,29	108%	66,83	108%
Rata-rata capaian tujuan			101,1%			99,6%		96%



3. Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Potensi Lokal

Strategi dalam mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis potensi lokal diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tercatat sebesar 5,97%, melampaui target sebesar 5,56% atau mencapai 107,37% dari target. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37% dan nasional sebesar 5,11% (BPS). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah relatif lebih baik dibandingkan wilayah pembanding serta mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Secara umum perekonomian Kabupaten Tegal menunjukkan proses pemulihan yang cukup stabil setelah mengalami kontraksi pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 perekonomian daerah mengalami kontraksi sekitar -1,46%, kemudian mulai mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi sekitar 3,72%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 4,93%, hingga akhirnya pada tahun 2025 mampu mencapai 5,97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi daerah mulai terjaga serta aktivitas ekonomi masyarakat semakin berkembang.

Capaian Kinerja Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	95,5	5,56	5,97	107%	5,85	102%
2.	Laju PDRB Sektor Pertanian	%	9,8	2,33	2,88	123,6%	2,53	113,8%
3.	Laju PDRB Sektor Industri	%	100	4,65	5,51	118,4	5,12	107,6%
4.	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	39,28	7,50	4,52	60%	10,5	43%
5.	Laju PDRB Sektor Perdagangan	%	117	3,15	5,88	186,6%	3,54	166,1
Rata-rata capaian tujuan			70,3%			119,2		106,5

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut, capaian indikator menunjukkan dinamika perkembangan pada masing-masing sektor ekonomi. Beberapa sektor menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah



ditetapkan, sementara beberapa sektor lainnya masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

a. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian.

Sektor pertanian diukur melalui indikator laju PDRB sektor pertanian. Pada tahun 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,88%, melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi, antara lain perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan produktivitas lahan. Fenomena iklim seperti El Niño yang menyebabkan berkurangnya curah hujan turut mempengaruhi produktivitas pertanian dan berdampak pada penurunan produksi beberapa komoditas utama. Namun demikian, sektor pertanian tetap memiliki peran strategis sebagai penyedia bahan pangan sekaligus penopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan

b. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan diukur melalui indikator laju PDRB sektor industri pengolahan. Pada tahun 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,51%, yang telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja mencapai 188,4%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja sektor industri pengolahan yang cukup baik di tengah dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional serta kemampuan produksi industri lokal.

Lebih lanjut, sektor industri pengolahan juga menunjukkan tren pemulihan yang positif. Setelah mengalami perlambatan pada masa pandemi, sektor ini mulai mengalami peningkatan aktivitas produksi seiring dengan meningkatnya permintaan pasar serta kemampuan pelaku industri dalam beradaptasi terhadap perkembangan kondisi ekonomi.

Sektor industri pengolahan memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan sektor ini menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata.

Sektor pariwisata diukur melalui indikator Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Capaian indikator ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah serta terbatasnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.

Selain itu peningkatan PAD secara keseluruhan juga turut mempengaruhi rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD. Meskipun demikian tren PAD sektor pariwisata menunjukkan peningkatan secara nominal yang menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Kabupaten Tegal mulai berkembang.

Pengembangan destinasi wisata, peningkatan promosi pariwisata, serta penguatan integrasi sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

d. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan.

Sektor perdagangan diukur melalui indikator laju PDRB sektor perdagangan. Pada tahun 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,88%, yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,15%, dengan capaian kinerja mencapai 186,6%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki kinerja yang sangat baik dan menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Peningkatan aktivitas perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya distribusi barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan semakin pulih dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Selain itu, perkembangan sektor perdagangan juga didukung oleh berbagai program pemerintah daerah, antara lain peningkatan kualitas sarana perdagangan, penguatan sistem distribusi barang, serta perlindungan konsumen. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025, menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,36, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 72,22

atau sekitar 101% dari target. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Untuk melihat perkembangan kualitas pembangunan manusia secara lebih komprehensif, IPM Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian Kinerja Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	IPM (indeks Pembangunan Masyarakat)	Angka	100,9	72,22	72,36	101%	72,72	99,5%
2.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	100,16	89,12	88,72 (n-1)	99%	89,95	98,6%
3.	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	na	0,310	0,315 (n-1)	101,61%	0,308	102%
4.	Indeks Pendidikan	Angka	101	0,620	0,606	98%	0,625	97%
5.	Indeks Kesehatan	Angka	103	0,835	0,84	101%	0,836	100,4%
Rata-rata capaian tujuan			104,3			100,1%		99,5%

Terlihat pada tabel di atas, rata-rata capaian berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, mencapai **100,1%**, yang menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal secara umum berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

- a. Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, capaian tahun 2025 adalah 72,36 telah melampaui target yang ditetapkan 72,22 atau mencapai 101% dari target. Peningkatan IPM tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang secara keseluruhan mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tegal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal, tren Indeks Pembangunan Manusia dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



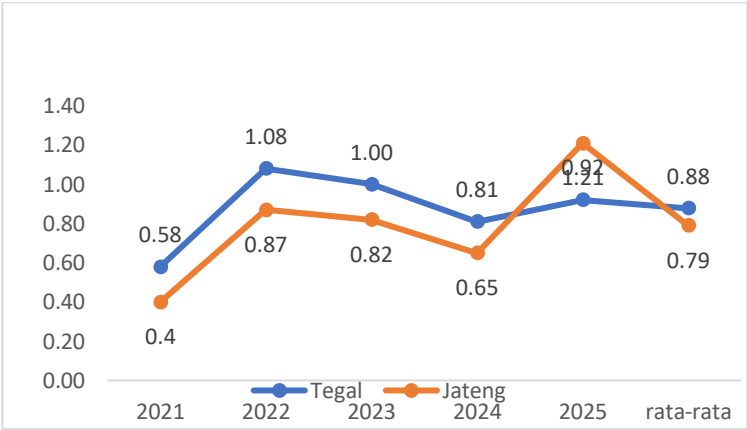
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 – 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
IPM :	69,67	70,42	71,12	71,70	72,36
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,74	73,87	74,01	74,25	74,62
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,89	12,91	12,92	12,96	12,97
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,99	7,25	7,34	7,36	7,37
Pengeluaran (Ribuan Rupiah/orang/tahun)	9.700	10.020	10.537	10.972	11.498

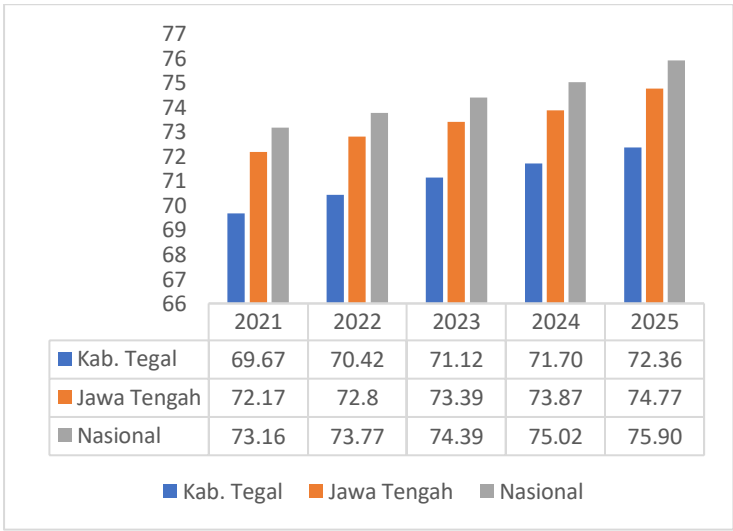
Selain melihat perkembangan nilai IPM secara tahunan, perbandingan pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

IPM Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025



Walaupun capaian Kabupaten Tegal, masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,77 dan Nasional sebesar 75,90 pada tahun 2025, dengan selisih masing-masing 2,41 poin dan 3,54 poin. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal Tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,77 dan nasional sebesar 75,90, dengan selisih masing-masing 2,41 poin dan 3,54 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan manusia di Kabupaten Tegal menunjukkan tren positif dan sejalan dengan arah pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat masih perlu terus diperkuat agar kesenjangan capaian IPM dapat semakin diperkecil. Peningkatan IPM tersebut dipengaruhi oleh perbaikan indikator penyusunnya, yaitu umur harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan perhitungan periode 2021–2025 menggunakan pembaruan data *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020).

Capaian tersebut juga didukung oleh berbagai program pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain program Yuk Sekolah Maning untuk menekan angka putus sekolah, program Rames Saceting dalam percepatan penurunan stunting, serta program One Day One Endog yang berfokus pada pemenuhan gizi anak. Upaya tersebut diperkuat melalui intervensi gizi melalui Rumah Pelita di tingkat desa serta aksi konvergensi percepatan penurunan stunting oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga didukung melalui pengembangan wirausaha pemuda dan penguatan UMKM. Secara keseluruhan, capaian IPM yang melampaui target menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Tegal.

- b. Untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), capaian sebesar 88,72 masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 89,12 atau mencapai 99% dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Selama periode 2020–2024 nilai IPG Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 86,79 pada tahun 2020 menjadi 88,72

pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan memperoleh standar hidup yang layak.

Perkembangan nilai IPG Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	86,79	87,53	88,22	88,54	88,72

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2025

- c. Pada tahun 2025, nilai IKG Kabupaten Tegal belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pengukuran capaian indikator menggunakan data tahun n-1 yaitu tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, nilai IKG Kabupaten Tegal sebesar 0,315 dengan capaian kinerja sebesar 101,6% terhadap target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengurangan ketimpangan gender di Kabupaten Tegal secara umum telah melampaui target yang direncanakan, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi perbaikan kesetaraan gender.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0.371	0.233	0.312	0,184	0,315

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2025

Ketimpangan gender yang masih terjadi berpotensi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia daerah. Keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan layak, pendidikan, serta pengambilan keputusan dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat kebijakan pembangunan yang responsif gender melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja yang layak, penguatan kapasitas kewirausahaan perempuan, serta peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dan pemerintahan. Kemudian, pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah serta peningkatan akses layanan kesehatan



reproduksi juga menjadi langkah strategis dalam menekan ketimpangan gender secara berkelanjutan.

- d. Pada indikator Indeks Pendidikan, capaian tahun 2025 sebesar 0,606 masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 0,620 atau mencapai 98% dari target, walaupun capaian ini masih termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah serta peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Perbaikan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Tegal secara umum terus mengalami peningkatan, yang tercermin dari meningkatnya indikator penyusun Indeks Pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2025, RLS Kabupaten Tegal tercatat 7,37 tahun, meningkat dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya yaitu 7,36 tahun, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100,27% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal semakin meningkat.

Selain itu, peningkatan Indeks Pendidikan juga didukung oleh meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2025, HLS tercatat sebesar 12,97 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 12,96 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya peluang yang semakin besar bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya akses pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta keberlanjutan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh generasi usia sekolah.

Secara umum, peningkatan nilai HLS dan RLS menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan masyarakat, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tegal. Hal ini juga menggambarkan bahwa berbagai program pembangunan di bidang pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesempatan belajar bagi masyarakat.

- e. Indikator Indeks Kesehatan tahun 2025 mencapai 0,84, melampaui target 0,835 dengan tingkat capaian 101%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, yang berdampak positif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,835, indikator ini

mengalami peningkatan dan juga telah melampaui target RPJMD tahun sebelumnya sebesar 0,804.

Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) dari 74,25 tahun pada 2024 menjadi 74,62 tahun pada 2025, yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup sehat masyarakat. Dari sisi indikator pendukung, Angka Kematian Ibu (AKI) juga menunjukkan perbaikan signifikan, menurun dari 74,25 menjadi 54,13 per 100.000 kelahiran hidup, sekaligus telah melampaui target nasional. Hal ini mengindikasikan efektivitas intervensi pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya pelayanan ibu, bayi, dan balita, masih perlu menjadi fokus kebijakan pada tahun berikutnya.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program kesehatan yang cukup optimal, dengan realisasi anggaran sebesar 90,28% dari total anggaran Rp303,01 miliar. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan telah berjalan efektif meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Secara keseluruhan, pembangunan sektor kesehatan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif, namun tetap memerlukan penguatan intervensi promotif, preventif, dan layanan kesehatan dasar secara berkelanjutan.

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator utama yang secara umum berada di atas target tahunan, khususnya pada aspek penurunan tingkat kemiskinan, membaiknya kualitas kemiskinan, serta terjaganya kondisi pasar tenaga kerja daerah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengukuran indikator pada tujuan ini disajikan pada berikut, yang memperlihatkan realisasi tahun 2025, perbandingan terhadap tahun sebelumnya, serta posisi terhadap target akhir dokumen perencanaan daerah.

Capaian Kinerja Kualitas Hidup Masyarakat

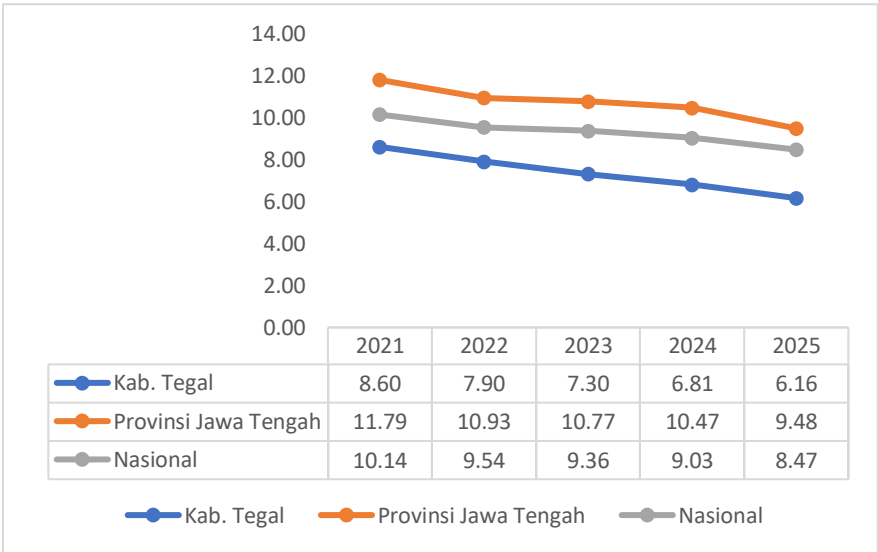
No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	101	6,85	6,16	110%	6,65	107,4%
2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	75,64	0,78	0,73	106%	0,68	85,3%
3.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	20	0,15	0,12	120%	0,14	92,9%
4.	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	119	8,40	7,62	109%	8,2	107%
Rata-rata capaian tujuan			78,91%			111,25%		98,15%

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator utama mampu melampaui target tahun 2025, dengan rata-rata tingkat pencapaian sebesar **111,25%** dan posisi terhadap target akhir RPD sebesar **98,15%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat telah berjalan efektif, terutama pada aspek penurunan kemiskinan dan pengendalian tingkat pengangguran terbuka.

a. Perkembangan Indikator Kemiskinan dan Kualitas Kemiskinan

Perkembangan indikator kemiskinan pada tahun 2025 menunjukkan tren yang semakin membaik, baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun kualitas kondisi masyarakat miskin. Penurunan tingkat kemiskinan yang disertai membaiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan secara lebih merata.

Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025



Data di atas menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun secara konsisten selama periode 2021–2025 dan berada pada tingkat yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan

Penduduk Miskin Tahun 2021 - 2025

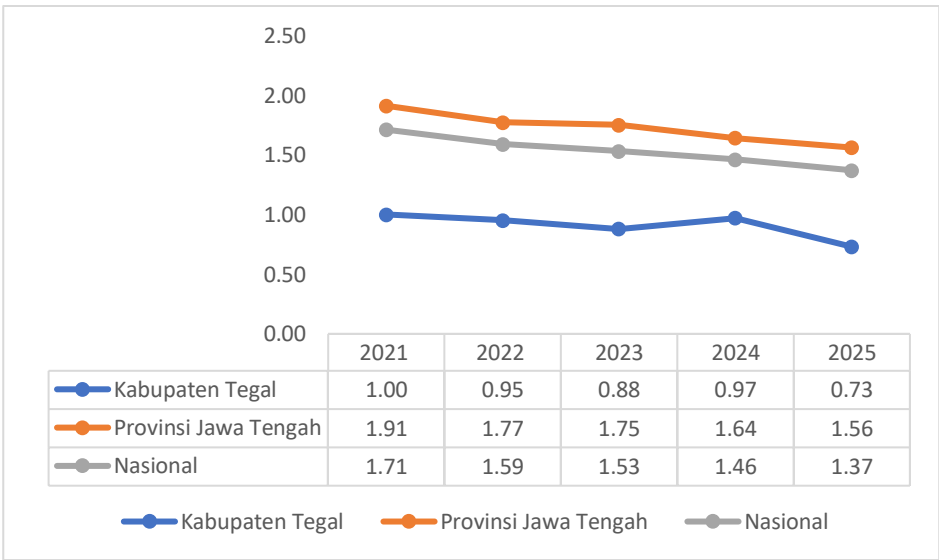
No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penduduk Miskin	123.520	113.620	105.030	98.020	88.700
2.	Jumlah Penduduk	1.596.996	1.596.996	1.623,595	1.674.800	1694.200
3.	Persentase (%)	8,60	7,90	7,30	6,81	6,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain jumlah penduduk miskin, kualitas kondisi kemiskinan juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Tegal Tahun 2021 – 2025

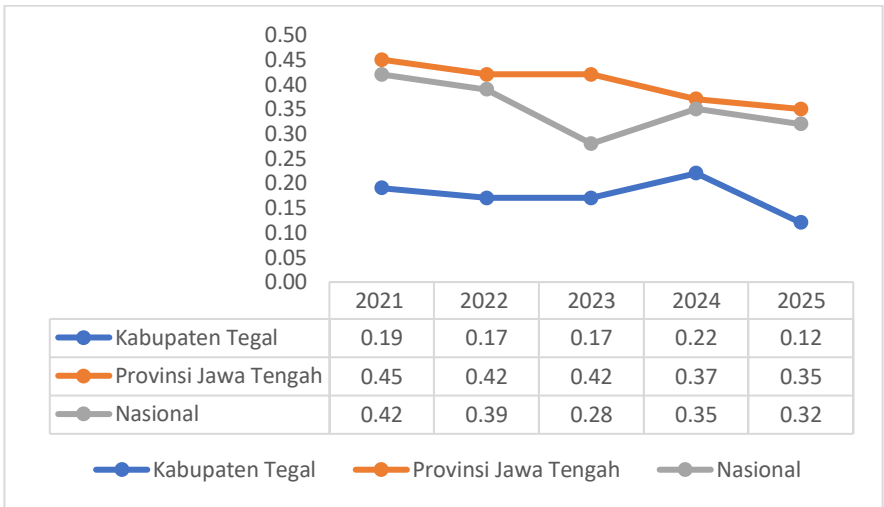


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren menurun pada tahun 2025, yang mengindikasikan semakin kecilnya jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin relatif membaik.



Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tegal Tahun 2021 – 2025



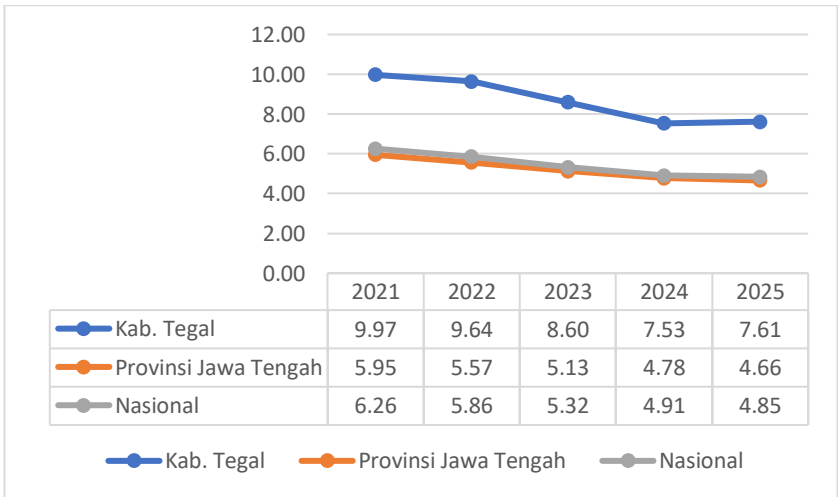
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin, sehingga distribusi kesejahteraan menjadi lebih merata.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan telah berjalan efektif, tidak hanya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga dalam memperkecil kesenjangan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan

- b. Perkembangan indikator ketenagakerjaan ditunjukkan melalui perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025. Meskipun masih terdapat dinamika pada pasar kerja daerah, indikator ini secara umum menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan tetap mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat .

TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 – 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025



TPT Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2021, meskipun pada tahun 2025 terjadi kenaikan tipis dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, kondisi ini masih menunjukkan arah yang relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mendekati rata-rata provinsi dan nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan investasi telah memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian tingkat pengangguran, meskipun masih diperlukan penguatan intervensi untuk mendekatkan kondisi daerah dengan rata-rata provinsi dan nasional.

6. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kondisi penting dalam mendukung stabilitas pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui penguatan penegakan peraturan daerah serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

NO	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	88,66	89,38	100,81	90,66	92,58	102,12	87,55	92,78	105,98

Perbandingan capaian indikator dalam periode 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Persentase penyelesaian gangguan ketertiban pada tahun 2023 tercatat sebesar 89,38% dengan capaian 100,81% dari target. Pada tahun 2024 realisasi meningkat menjadi 92,58% dengan capaian 102,12%, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 92,78% dengan capaian 105,98% dari target.

Perkembangan capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menangani gangguan ketertiban umum semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, penguatan pengawasan di ruang publik, serta



meningkatnya responsivitas aparat dalam menangani berbagai gangguan ketertiban masyarakat.

Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Umum

No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	90,66	87,55	92,78	106%	88,55	104,8%
2.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	%	103	87,86	93,53	106%	88,35	105,9%
Rata-rata capaian tujuan			100,81			106%		105,35%

Data pada tabel menunjukkan bahwa kedua indikator kinerja utama pada tujuan ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan pada tahun 2025 mencapai 92,78%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 87,55%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 106%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan gangguan ketertiban umum berjalan secara efektif melalui peningkatan pengawasan serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban masyarakat.

Indikator kedua yaitu persentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan juga menunjukkan capaian yang melampaui target. Pada tahun 2025 indikator ini mencapai 93,53%, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 87,86%, dengan tingkat capaian sebesar 106%. Hal ini menggambarkan meningkatnya efektivitas penegakan peraturan daerah serta semakin kuatnya fungsi pengawasan dalam menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan capaian indikator pada tujuan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh indikator kinerja utama mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian mencapai 106%. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya efektivitas penanganan gangguan ketertiban masyarakat serta semakin optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tegal.



Kondisi ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antar perangkat daerah, pelaksanaan pengawasan di ruang publik, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan semakin berjalan dengan baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan, serta peningkatan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.

Capaian Sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan 2023-2025

No	Indikator Kinerja Utama	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	88,66	89,38	100,81	90,66	93,38	103,00	87,86	93,53	106,70

Jika dilihat dari perkembangan capaian selama periode 2023–2025, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 89,38 persen atau 100,81 persen dari target, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 93,38 persen atau 103,00 persen dari target, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 93,53 persen atau 106,70 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berjalan semakin efektif dari tahun ke tahun.

Meskipun target tahun 2025 mengalami penurunan dari 90,66 persen menjadi 87,86 persen sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD), realisasi kinerja tetap meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program penegakan peraturan tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditindak Lanjuti 2020-2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penegakan Perda					
a	Jumlah Pelanggaran Perda	529	525	421	302	819
b	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	485	450	388	282	766
c	Penyelesaian Penegakan Perda (%)	91,68	85,71	92,16	93,38	93,53



Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, pada tahun 2025 tercatat 819 kasus pelanggaran Peraturan Daerah, dengan 766 kasus berhasil diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 93,53 persen. Persentase ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 93,38 persen, dan menunjukkan peningkatan dibanding tren tahun-tahun sebelumnya, kecuali penurunan yang terjadi pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan semakin baiknya efektivitas penanganan pelanggaran melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penindakan.

Kinerja tersebut didukung oleh penegakan terhadap sejumlah regulasi prioritas, antara lain terkait ketertiban umum, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang wilayah, bangunan gedung, dan pengendalian menara telekomunikasi. Upaya ini berkontribusi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kepatuhan hukum di daerah.

Dari sisi pembiayaan, program ini didukung anggaran sebesar Rp1.046.056.540 dengan realisasi Rp931.171.746 atau 89,02 persen, yang menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,98 persen. Dengan realisasi kinerja yang tetap melampaui target, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berlangsung secara efektif dan efisien.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang tercermin dari masih tingginya jumlah pelanggaran pada tahun 2025. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, edukasi hukum, dan pengawasan lapangan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7. Menurunnya Risiko Bencana

Kabupaten Tegal memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kinerja tujuan Menurunnya Risiko Bencana pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan Tabel 2.18, rata-rata tingkat pencapaian tujuan mencapai 90,5 persen dengan kategori Sangat Tinggi, sedangkan terhadap target akhir RPD 2025–2026 telah tercapai sebesar 87,7 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengurangan risiko bencana telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target akhir dokumen perencanaan daerah.

Capaian Kinerja Penurunan Risiko Bencana

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target Akhir RPD 25-26
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,89	0,83	93%	0,95	87,4
2.	Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Poin	90	80	88%	90	88
Rata-rata capaian tujuan					90,5%		87,7%

Indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,83 dari target 0,89, dengan tingkat pencapaian 93 persen. Nilai ini berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam aspek kelembagaan, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pasca bencana telah berjalan dengan baik. Dibandingkan tahun 2023 dan 2024, nilai IKD juga menunjukkan tren peningkatan dari 0,75 menjadi 0,81, kemudian meningkat kembali menjadi 0,83 pada tahun 2025. Perkembangan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan standar provinsi sebesar 0,75, nilai IKD Kabupaten Tegal telah berada di atas target tersebut, bahkan telah memenuhi kategori kapasitas minimal nasional yang ditetapkan dalam Renstra BNPB. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penanggulangan bencana Kabupaten Tegal relatif lebih baik dibandingkan standar minimal yang ditetapkan di tingkat yang lebih luas.

Selain itu, indikator Persentase Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana menunjukkan realisasi sebesar 80 dari target 90, atau setara 88 persen, sedangkan pada pengukuran sasaran kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan tercatat 101,27 persen dari target internal yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kesiapsiagaan dan respons kedaruratan bencana telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek respons cepat, penyediaan rencana kontinjensi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Peningkatan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC), peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana), penyediaan *Early Warning System* (EWS) di wilayah rawan, serta pelaksanaan mitigasi lingkungan dan pemulihan



infrastruktur pasca bencana. Dari sisi tata kelola, penguatan dokumen kebencanaan seperti Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesiapsiagaan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana kebencanaan, belum meratanya kapasitas personel dan aparatur desa, serta masih terbatasnya jumlah Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar kesiapsiagaan bencana dapat lebih merata hingga tingkat desa dan satuan pendidikan.

Dari sisi pembiayaan, program penanggulangan bencana didukung anggaran sebesar Rp1.108.488.675, dengan realisasi sebesar Rp1.012.379.271 atau 91,33 persen. Dengan tingkat pencapaian indikator yang berada pada kategori sangat tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berlangsung secara efektif, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,67 persen.

Secara keseluruhan, tujuan Menurunnya Risiko Bencana menunjukkan perkembangan yang positif dan semakin menguat dari tahun ke tahun. Ke depan, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan perangkat peringatan dini, serta penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan penurunan risiko bencana di Kabupaten Tegal.

8. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Kabupaten Tegal memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Kekayaan budaya tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga berfungsi sebagai benteng sosial dalam menghadapi pengaruh budaya luar yang semakin cepat masuk di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pelestarian budaya dan kearifan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya pengenalan, pengembangan, serta pewarisan kepada generasi muda.

Pelestarian budaya tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyimpan atau mendokumentasikan warisan budaya dalam bentuk fisik seperti museum atau arsip, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan budaya sejak dini di lingkungan sekolah, penyelenggaraan berbagai kegiatan seni budaya,

serta penguatan peran komunitas budaya dalam menjaga keberlanjutan tradisi lokal.

Tujuan meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan dicapai melalui satu sasaran yaitu meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan, yang diukur melalui dua indikator yaitu Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 101%, dengan realisasi sebesar 65,50% dari target 65,15%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan menunjukkan capaian kinerja sebesar 121%, dengan realisasi sebesar 84,34% (data n-1) dari target 69,65%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk seni dan kesenian daerah di Kabupaten Tegal semakin aktif dilestarikan melalui kegiatan pembinaan, pertunjukan seni, serta pelibatan komunitas budaya dan pelaku seni lokal.

Capaian Kinerja kubencanakan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

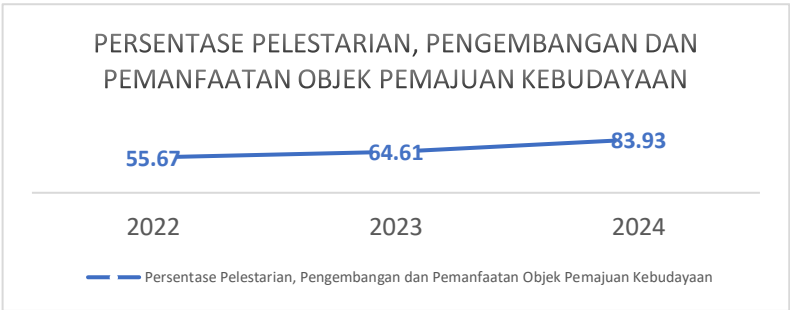
No.	Indikator Kinerja	Satuan	% Capaian 2024	Capaian 2025			Target Akhir RPD 25-26	% Capaian Terhadap Target RPD 25-26
				Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen	113,9	65,15	65,50	101%	66	99,2%
2.	Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan	Persen	106,15	69,65	84,34 (n-1)	121%	70,25	120%
Rata-rata capaian tujuan			106,6%			111%		109,6%

Dari tabel secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tujuan ini pada tahun 2025 mencapai 111% dengan kategori “Sangat Baik”, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2025–2026, capaian kinerja mencapai 109,6% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Jika dibandingkan dengan



capaian tahun 2024 sebesar 106,6%, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 4,4%.

Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelestarian dan pewarisan budaya daerah.

Dalam mewujudkan peningkatan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bidang Kebudayaan, terus melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kebudayaan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal sekaligus memperkuat eksistensi seni dan kesenian tradisional di tengah perkembangan zaman.

Festival seni budaya dan pengembangan rumah budaya menjadi sarana strategis untuk memberikan ruang bagi para pelaku seni dan budaya dalam menampilkan karya, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal. Selain itu, kegiatan tersebut juga berperan dalam meningkatkan daya kritis, kreatif, produktif, dan apresiatif masyarakat terhadap karya seni yang berakar pada nilai budaya masyarakat Kabupaten Tegal.

Peningkatan frekuensi kegiatan seni budaya serta pembinaan terhadap pelaku seni dan komunitas budaya menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya daerah. Dengan demikian, diharapkan budaya lokal Kabupaten Tegal tetap terjaga kelestariannya dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

3.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2 GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di Daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.



Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakikatnya merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan/atau Desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan



dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tegal tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tegal tidak mendapat Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pendidikan yang dikelola oleh kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pendidikan Dasar Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan yang dikelola kabupaten dengan ketentuan Pendidikan dasar usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun, penerima jenis layanan Pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun dan penerima jenis layanan Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah yang harus dilayani	59.379	12 bulan	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	76,01	12 bulan	27.728.142.024
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S.1)/Diploma empat (D-IV)	78,04		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	261.587	12 bulan	Kemampuan Literasi SD	64,34	12 bulan	231.812.729.749
					Kemampuan Numerasi SD	56,50		
					Indeks Iklim Keamanan SD	74,61		
					Indeks Iklim Kebinekaan SD	73,24		
					Indeks Iklim Inklusivitas SD	60,05		
					Kemampuan Literasi SMP	74,10		
					Kemampuan Numerasi SMP	65,18		



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
					Indeks Iklim Keamanan SMP	72,02		
					Indeks Iklim Kebinekaan SMP	71,83		
					Indeks Iklim Inklusivitas SMP	61,06		
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah yang harus dilayani	8.787	12 bulan	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) Kesenjangan	43,69	12 bulan	11.303.721.850

4.1.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	93,04	93,04	27.728.142.024	27.372.911.561	98,71
2	Pendidikan Dasar	100	91,70	91,70	231.812.729.749	223.899.155.341	96,59
3	Pendidikan Kesenjangan	100	94,87	94,87	11.303.721.850	10.990.990.774	97,23



Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			93.05 %
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					93.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.43 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	59379	55245	4134	93.04 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.51 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.55 %
	1 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	76.01	75.59	0.4200	99.45 %
	2 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78.04	74.65	3.3900	95.66 %
2 .	Pendidikan Dasar					93.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.36 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	261587	239888	21699	91.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.72 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.58 %
	SD					98.64 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	64.34	75.76	-11.4200	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	56.5	72.7	-16.2000	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74.61	73.7	0.9100	98.78 %
	4 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73.24	72.23	1.0100	98.62 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.05	57.54	2.5100	95.82 %
	SMP					98.51 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	74.1	81.68	-75.800	100.00 %
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	65.18	78.23	-130.500	100.00 %
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.02	70.51	15.100	97.90 %
	4 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	71.83	70.82	10.100	98.59 %
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.06	58.65	24.100	96.05 %
3 .	Pendidikan Kesenjangan					92.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.89 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8787	8336	451	94.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					16.24 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81.21 %
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	43.69	35.48	82.100	81.21 %



4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		27.728.142.024	
2.	Pendidikan Dasar		231.812.729.749	
3.	Pendidikan Kesetaraan		11.303.721.850	
	TOTAL		270.844.593.623	

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	315
3	Strata 1 / Diploma 4	11.432
4	Diploma 3	254
5	Diploma 2	198
6	Diploma 1	34
7	SMA / MA / Sederajat	2.478
8	SMP / MTs / Sederajat	178
9	SD / MI / Sederajat	299
	TOTAL	15.188



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1		Ketersediaan data anak yang tidak bersekolah belum terverifikasi dan tervalidasi	
2		Keterjangkauan fasilitas pendidikan	
3		Keterbatasan Sarana dan Prasarana pembelajaran	
4		Distribusi serta kebutuhan Guru yang tidak merata	
II.	EKSTERNAL		
1		Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya pendidikan	



4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh warga negara dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan, serta untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilaksanakan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.

Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis, yang terdiri atas:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

4.2.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.509	1 tahun	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.509	1 tahun	200.000.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.509	1 tahun	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.509	1 tahun	1.536.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.435	1 tahun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	18.435	1 tahun	403.842.000



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	102.529	1 tahun	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	102.529	1 tahun	569.000.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	225.679	1 tahun	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.	225.679	1 tahun	100.000.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	708.285	1 tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	708.285	1 tahun	1.210.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	148.770	1 tahun	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	148.770	1 tahun	184.800.000



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	171.644	1 tahun	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	171.644	1 tahun	400.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	29.879	1 tahun	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	29.879	1 tahun	330.000.000
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	3.417	1 tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	3.417	1 tahun	70.000.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	33.537	1 tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	33.537	1 tahun	4.051.632.200



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	28.800	1 tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	28.800	1 tahun	155.000.000

4.2.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.509	18.465	99,8	200.000.000	191.272.512	95,6
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.509	18.509	100	1.536.000.000	1.338.354.518	87,1
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.435	18.435	100	403.842.000	359.712.012	89,1
4	Pelayanan Kesehatan Balita	102.529	102.529	100	569.000.000	400.126.982	70,3
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	225.679	225.679	100	100.000.000	96.170.000	96,2
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	708.285	708.285	100	1.210.000.000	1.193.745.367	98,7
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	148.770	147.370	99,1	150.000.000	127.970.000	85,3
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	171.644	164.290	95,7	400.000.000	389.404.800	97,4
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	29.879	33.472	112	330.000.000	315.522.100	95,6
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	3.417	3.432	100,4	70.000.000	65.081.100	93,0
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.537	34.024	101,5	200.000.000	178.527.700	89,3
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	28.800	30.321	105,3	155.000.000	149.922.500	96,7



Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.62 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					99.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.81 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18509	18465	44	99.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.77 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.87 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	18509	18484	25	99.86 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	3998340	3323700	674640	83.13 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	18509	18465	44	99.76 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	18509	18465	44	99.76 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	18509	18465	44	99.76 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	2276	2270	6	99.74 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	18509	18465	44	99.76 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	18509	18465	44	99.76 %
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18509	18465	44	99.76 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	1234	1231	3	99.76 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	104	104	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	756	756	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)					
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	18509	18465	44	99.76 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18509	18509	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	18509	18509	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	18509	18509	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18509	18509	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	104	104	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	756	756	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	323	323	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18435	18435	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	18435	18435	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	18435	18435	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	18435	18435	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	18435	18435	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	18435	18435	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18435	18435	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	29	29	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	100	100	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	63	63	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	7457	7457	0	100.00 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					99.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	102529	102529	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.55 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.74 %
	1 . Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	102529	102529	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	102529	102529	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	102529	102529	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	10517	10517	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	84365	84365	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	20203	18584	1619	91.99 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	20203	18562	1641	91.88 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	20203	18487	1716	91.51 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	20203	18966	1237	93.88 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	20203	19938	265	98.69 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	20275	18414	1861	90.82 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	20275	19011	1264	93.77 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	84365	84365	0	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	29	29	0	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	29	29	0	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	2439	2439	0	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	7457	7457	0	100.00 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	225679	225679	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	225679	225679	0	100.00 %
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	225679	225679	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	225679	225679	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	225958	225958	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	5217	5217	0	100.00 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	1316354	1316354	0	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	116	116	0	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	26583	26583	0	100.00 %
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	29	29	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	29	29	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	111	111	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	7457	7457	0	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	8488	8488	0	100.00 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					76.87 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	56.87 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	708285	503501	204784	71.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	29	29	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	1148	1148	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	1148	1148	0	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	116	116	0	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	29	29	0	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	29	29	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	708285	708285	0	100.00 %
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	29	29	0	100.00 %
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	708285	708285	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	87	87	0	100.00 %
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	29	29	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	29	29	0	100.00 %
	c. Vasektomi set	Unit	29	29	0	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	29	29	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	29	29	0	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7457	7457	0	100.00 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					99.23 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.25 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	148770	147370	1400	99.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.99 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.93 %
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	29	29	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	29	29	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	29	29	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	29	29	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	29	29	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	148770	147370	1400	99.06 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7457	7457	0	100.00 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					96.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.57 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	171644	164290	7354	95.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.93 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.64 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	29	29	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	29	29	0	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	1148	1148	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	171644	164290	7354	95.72 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	29	29	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	64	64	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	29879	33472	-3593	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	29	29	0	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	29	29	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	29	29	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	29879	33472	-3593	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	58	58	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	77	77	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3417	3432	-15	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	60	60	0	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	5	5	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	150272	274771	-124499	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	348	348	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	29	29	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	96	96	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	29	29	0	100.00 %
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	29	29	0	100.00 %
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	29	29	0	100.00 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					99.70 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	33573	34024	-451	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.70 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.52 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	41	41	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	200	200	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	41	41	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	41	41	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	15982	15982	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	41	41	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	42	42	0	100.00 %
	8 . Tuberkuilin	Vial	900	700	200	77.78 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	106	106	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	756	756	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	24	24	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	7457	7457	0	100.00 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28800	30321	-1521	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	29	29	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	28800	30321	-1521	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	40	40	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	40	40	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	105	105	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	756	756	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	323	323	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	64	64	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	10	10	0	100.00 %



4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	200.000.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	1.536.000.000	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	403.842.000	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	-	569.000.000	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	100.000.000	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	-	1.210.000.000	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	34.800.000	150.000.000	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	400.000.000	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	330.000.000	
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	-	70.000.000	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.851.632.200	200.000.000	
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	-	155.000.000	

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	18
3	Strata 1 / Diploma 4	315
4	Diploma 3	1018
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	0
8	SMP / MTs / Sederajat	0
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	1.351



4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I. INTERNAL			
1	Akses ke pelayanan	Akses pelayanan kesehatan mengalami kendala terutama di daerah pegunungan	tersedianya sarana untuk pertolongan persalinan sesuai standar di desa
2	Sarana prasarana	Peralatan tensimeter, glukometer belum mencukupi karena ada sebagian yang rusak	Pengadaan tensimeter sebanyak 106 unit, posbindu kit 25 buah, tetapi masih tetap belum mencukupi
		Jumlah bahan habis pakai belum memenuhi semua sasaran	Mengajukan anggaran untuk BHMP lewat dana desa, namun belum semua desa memenuhinya
3	Kesenjangan data	Masih ada kesenjangan data antara pelaporan aplikasi ASIK dengan laporan manual	Input data dilaksanakan pada saat kegiatan skrining PTM maksimal 1 hari setelah berkegiatan, sehingga tidak ada data yang menumpuk. Ada pembagian tugas yang jelas untuk kader dari meja 1 s.d 5
		Pencatatan dan pelaporan masih kurang optimal sehingga kemungkinan terjadi dobel pelaporan	pencatatan melalui kohort lansia untuk memantau kondisi lansia di wilayahnya
		Masih ada double data yang tercatat	Puskesmas sebaiknya mempunyai kohort penderita hipertensi dan diabetes melitus untuk menghindari adanya double data yang tercatat
		Belum semua Puskesmas mengirimkan laporan teratur setiap bulan	Dilakukan validasi data setiap tri wulan
II. EKSTERNAL			
1	Kondisi kesehatan ibu hamil	Kehamilan yang berakhir sebelum lengkap diperiksa minimal enam kali (K6)	Pemberian pelayanan Antenatal Care (ANC) sesuai standar
			Skrining Pasangan Usia Subur (PUS) layak hamil
2	Penggunaan jumlah sasaran/estimasi awal tahun	Jumlah sasaran awal tahun lebih banyak dibandingkan sasaran real	Denominator yang digunakan adalah jumlah sasaran real



NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Estimasi hipertensi terlalu tinggi (prevalensi hipertensi Kab. Tegal 34,68% berdasarkan hasil riskesdas tahun 2023) yang menjadi dominan sehingga untuk mencapai target 100% sangat berat	Perlu adanya SK Bupati Tahun 2024 terkait sasaran SPM bidang kesehatan, sehingga sasaran di sesuaikan dengan sasaran riil yang di lapangan
3	Mobilitas penduduk	Mobilitas penduduk termasuk ibu hamil yang tidak melalui K6	Mencatat pelayanan K6 yang sudah didapat oleh ibu hamil
		Ada sebagian masyarakat merantau ke luar kota, padahal sudah menjadi sasaran di awal tahun	Pendataan sasaran riil usia (15-59 tahun) <i>by name by address</i> per RT
4	Deteksi kehamilan	Masih adanya ibu hamil yang tidak terdeteksi	Koordinasi dengan kader untuk menemukan ibu hamil baru
5	Mitos terkait persalinan	Masih adanya mitos terhadap persalinan yang ditolong oleh dukun bayi lebih baik dibanding ditolong oleh tenaga kesehatan	Edukasi pada masyarakat dan dukun bayi
6	Bayi meninggal sebelum menerima pelayanan neonatal lengkap	Bayi meninggal sebelum menerima pelayanan neonatal lengkap (kurang dari 8 hari)	Pemberian pelayanan ANC dan bayi baru lahir sesuai standar
7	Kunjungan balita	Balita tidak berkunjung ke posyandu	Melakukan sweeping
8	Pemberdayaan kader dan masyarakat	Pemberdayaan kader dalam melaksanakan skrining kesehatan di beberapa wilayah puskesmas belum optimal	Melaksanakan orientasi/pelatihan kader posbindu terkait dengan konsep posbindu, sasaran per desa dalam 1 tahun sampai dengan pencatatan dan pelaporan di ASIK
		Pelaksanaan posbindu di sekolah, tempat kerja/perusahaan masih dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan kader posbindu	Pada bulan November 2023 sudah dilakukan pelatihan dan pembentukan posbindu institusi/sekolah sebanyak 5 institusi, harapannya institusi dapat melaksanakan skrining PTM secara mandiri dan berkesinambungan
9	Kesadaran masyarakat terkait kesehatan	Masyarakat belum sadar dan peduli akan pentingnya cek kesehatan secara berkala dan merasa takut ketahuan penyakitnya khususnya yang berjenis kelamin laki-laki	Edukasi, penyuluhan, promosi yang masif terkait pentingnya Gerakan Cek Kesehatan Penyakit Tidak Menular (GERCEP)
		Pelaksanaan posbindu peserta yang datang orang-orang itu saja (orang yang sama) padahal 1 orang dihitung 1 kali dalam 1 tahun	Dibutuhkan penggerakan sasaran yaitu dengan memberi undangan bagi masyarakat yang usia 15-59 tahun untuk datang ke posbindu, dan



NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
			pelaksanaan posbindu diharapkan disisir/di jadwal per RT, jika diberi undangan tidak hadir maka kader dan petugas mengunjungi ke rumah warga
		Kunjungan lansia ke tempat layanan masih kurang, terutama laki - laki.	memberi pelayanan lansia melalui posyandu mobile untuk memperluas jangkauan layanan
		Penderita Hipertensi tidak rutin kontrol ke faskes dan tidak minum obat rutin setiap bulan, karena merasa tidak ada keluhan. Padahal penderita hipertensi harus minum obat rutin setiap hari agar terkendali dan mencegah terjadinya komplikasi serta kematian	pada tahun 2023 sudah dilakukan kegiatan MRINGIS (Marani penderita hipertensi dan kencing manis) di seluruh desa di wilayah Kab. Tegal untuk mendekatkan akses penderita hipertensi dan diabetes melitus untuk kontrol dan mendapatkan obat secara gratis. Dan promosi kesehatan terkait PATUH untuk penyandang PTM
10	Anggaran	Anggaran APBD terbatas	Advokasi penggunaan dana desa



4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pekerjaan umum pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		12 bulan	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		12 bulan	

4.3.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						



Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			79.49 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					71.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.52 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1674803	1329851	344952	79.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					7.94 %
	JARINGAN PERPIPAAN					
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	39.70 %
	JARINGAN PERPIPAAN					35.80 %
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	418701	149904	268,797.0000	35.80 %
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	418701	149904	268,797.0000	35.80 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	418701	182559	236,142.0000	43.60 %
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	418701	182559	236,142.0000	43.60 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					87.53 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.97 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1654860	1550738	104122	93.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					12.56 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	62.80 %
	KUANTITAS SPALD					93.71 %
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	413715	387684	26,031.0000	93.71 %
	KUALITAS SPALD					31.89 %
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	413715	1517	412,198.0000	0.37 %
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua						
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	413715	6547	407,168.0000	1.58 %
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	413715	387684	26,031.0000	93.71 %



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			

4.3.5. Dukungan Personil



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1		Data Base Capaian Air Minum (SPM) DPUPR belum sampai ke BNBA	
2		Data Capaian Sanitasi Kabupaten Tegal yang kami punya belum rigid sampai dengan BNBA.	



4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fasilitasi dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis dan sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah setiap warga negara, dengan ketentuan:

1. Korban bencana Kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		12 bulan	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	12 bulan	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan		12 bulan	

4.4.3. Realisasi

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	Bencana meliputi: a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi;					



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.					
	Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	10	10	0	100.00 %
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00 %
2 .	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi: a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana					
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-100%	100.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI :					100.00 %
	1. Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			100.00 %
	1. PENDATAAN					50.00 %
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00 %
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100.00 %
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100.00 %
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %
	2. PERHITUNGAN					100.00 %
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00 %
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100.00 %
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00 %
	3. PERENCANAAN					100.00 %
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00 %
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100.00 %



4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun
2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota			

4.4.5. Dukungan Personil



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1		Kurangnya petugas yang fokus dalam melaksanakan SPM sehingga sering kali data diskontinyu	
2		Petugas kurang memahami pelaksanaan SPM di sektor Perumahan Rakyat sehingga pemenuhan tahan kurang optimal	
II.	EKSTERNAL		
1		Belum ada dukungan dari pimpinan daerah sehingga anggaran cukup terbatas	



4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dasar hukum yang berlaku untuk Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten//Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten//Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten//Kota dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana meliputi:

1. prosedur operasional penanggulangan bencana;
2. sarana prasarana penanggulangan bencana;
3. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
4. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran meliputi:

1. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
3. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;



4. kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
5. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
6. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

4.5.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Dasar Trantibumlinmas	100 %	1 Tahun				APBD
2	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)				Persentase Sarpras Pendukung Pelayanan Yang Layak Pakai	100%	1 Tahun	APBD



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
3	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)				Persentase Gangguan Trantibum Yang Diselesaikan Sesuai SOP	100%	1 Tahun	APBD
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang				Persentase Ketersediaan Personil Satpol PP/Linmas Sesuai Standar	100%	1 Tahun	APBD



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)							
5	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1 Tahun	APBD



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	bentuk dokumen yang sah dan legal							
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)				Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada	100%	1 Tahun	APBD
7	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)				Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pengobatan sesuai standar pelayanan kesehatan	100%	1 Tahun	APBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							589.827.775



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
8	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							566.805.775
	<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	layanan	87	12 bulan	layanan	87	12 bulan	166.805.775
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	unit	352	12 bulan	unit	352	12 bulan	400.000.000
9	Kegiatan Investasi Kejadian Kebakaran							5.000.000



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	<i>Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</i>	layanan	22	12 bulan	layanan	22	12 bulan	5.000.000
10	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							18.022.000
	<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i>	layanan	68	12 bulan	layanan	68	12 bulan	18.022.000
11	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	31.327.500



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
12	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	362.202.200
13	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	714.958.975



4.5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	908	908	100	9.376.877.510	8.597.371.660	91,69

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				589.827.775	543.170.136	92,09%
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				566.805.775	520.518.786	91,83%
	<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	87	62	71%	166.805.775	163.647.324	98,11%
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	352	352	100%	400.000.000	356.871.462	89,22%
2	Kegiatan Investasi Kejadian Kebakaran				5.000.000	4.965.000	99,30%
	<i>Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan</i>	22	22	100%	5.000.000	4.965.000	99,30%



	<i>Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</i>						
3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				18.022.000	17.686.350	98,14%
	<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i>	68	68	100%	18.022.000	17.686.350	98,14%

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Bencana Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.613.949	1.613.949	100,00	31.327.500	29.063.250	92,77
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	480	480	100,00	362.202.200	337.178.260	93,09
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	23.625	23.625	100,00	714.958.975	646.137.761	90,37

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			99.08 %
1 .	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					99.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	908	908	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 19.08 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.38 %
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	258	258	0	100.00 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	18	18	0	100.00 %
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	7202	5204	1998	72.26 %
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	0	100.00 %
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	806	0	806	100.00 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	806	0	806	100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1613949	1613949	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0		100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0		100.00 %
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1	1	0	100.00 %
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	6	6	0	100.00 %
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100.00 %
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100.00 %
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	480	480	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0		100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0		100.00 %
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0		100.00 %
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	100.00 %
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	100.00 %
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	100.00 %
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	6	6	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	60	60	0	100.00 %
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00 %
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0		100.00 %
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	6	6	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	2) Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	55	55	0	100.00 %
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0	100.00 %
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	2	2	0	100.00 %
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	8	8	0	100.00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	43	43	0	100.00 %
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00 %
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00 %
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	21	21	0	100.00 %
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	21	21	0	100.00 %
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	21	21	0	100.00 %
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	21	21	0	100.00 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
Terjadi bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23625	23625	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	14	14	0	100.00 %
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	20	20	0	100.00 %
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	100.00 %
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	4	4	0	100.00 %
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	440	440	0	100.00 %
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	0	100.00 %
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	90	90	0	100.00 %
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					96.51 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	473	473	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				(20%)	16.51 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.53 %
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	87	62	25	71.26 %
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	8	8	0	100.00 %
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	352	352	0	100.00 %
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	46	11	35	23.91 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	126	126	0	100.00 %
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	84	84	0	100.00 %



4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.415.129.540	
2	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		369.073.000	
3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		298.195.000	
4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		24.980.000	
5	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		45.898.000	
6	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1.046.056.540	
7	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		5.562.500	
8	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			48.831.500
9	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan			991.662.540



	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		589.827.775	
10	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		566.805.775	
	<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>166.805.775</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>		<i>400.000.000</i>	
11	Kegiatan Investasi Kejadian Kebakaran		5.000.000	
	<i>Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</i>		<i>5.000.000</i>	
12	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		18.022.000	
	<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i>		<i>18.022.000</i>	
13	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		31.327.500	
14	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		362.202.200	
15	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		714.958.975	



4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Sub Urusan Trantibumlinmas

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	2
3	Strata 1 / Diploma 4	23
4	Diploma 3	1
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	57
8	SMP / MTs / Sederajat	1
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	84

Sub Urusan Pemadam Kebakaran

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	1
3	Strata 1 / Diploma 4	4
4	Diploma 3	0
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	40
8	SMP / MTs / Sederajat	1
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	46

Sub Urusan Bencana

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	6
3	Strata 1 / Diploma 4	23
4	Diploma 3	4
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	20
8	SMP / MTs / Sederajat	2
9	SD / MI / Sederajat	0
	TOTAL	55



4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Sub Urusan Trantibumlinmas

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1	SDM Satpol PP	Masih ada yang Non ASN jadi tidak bisa ikut Diklat Dasar Pol PP	Pengangkatan menjadi ASN
2	Satlinmas	Data Satlinmas masih menggunakan Tahun 2022 dan banyak Satlinmas desa mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas oleh Babinsa/Babinkamtibmas setempat yang tidak dilaporkan ke Satpol PP	Pendataan ulang Satlinmas tiap 5 Tahun dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas oleh Babinsa/Babinkamtibmas dimasukkan SPM sehingga Persentase Mutu Layanan Dasar meningkat
II.	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib masih kurang	Menyadarkan masyarakat untuk menjaga ketertiban

Sub Urusan Pemadam Kebakaran

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1		Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal hingga saat ini masih belum memadai	
2		Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggota masih sangat terbatas	
3		Keterbatasan dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan operasional dan kegiatan pemadam kebakaran	
II.	EKSTERNAL		



NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1		Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat terutama untuk anak – anak sekolah mulai dari PAUD sampai SD

Sub Urusan Bencana

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
1		Minimnya tenaga dan sarana prasarana di BPBD mengakibatkan pelaksanaan pelayanan kurang maksimal	Memanfaatkan tenaga dan sarana prasarana yang ada secara optimal
2		Belum adanya sensus atau pendataan ke lapangan secara menyeluruh dan serentak yang memerlukan tenaga dan biaya yang besar	Memperkirakan jumlah korban bencana baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung
3		BPBD belum mendapatkan akses data kependudukan untuk memperoleh data warga negara yang dilayani secara by name by address termasuk NIK, nomor KK dan informasi kependudukan lainnya	Berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dengan menampilkan data kumulatif
II.	EKSTERNAL		
1		Kepedulian Pemerintah terhadap sub Urusan Bencana masih minim sehingga BPBD mendapatkan alokasi anggaran yang cukup kecil, padahal sub Urusan Bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan juga merupakan unsur dalam SPM yang harus diutamakan oleh Pemerintah	Membuat perencanaan anggaran dengan mengalokasikan kegiatan berdasarkan prioritas dalam mendukung capaian penerapan SPM



4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							
	Penyediaan permakanan	Orang	588	12 Bulan	Orang	4.507	12 Bulan	APBD
	Penyediaan sandang	Orang	50	12 Bulan	Orang	190	12 Bulan	APBD
	Penyediaan alat bantu	Orang	45	12 Bulan	Orang	93	12 Bulan	APBD
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	12 Bulan	Orang	39	12 Bulan	APBD
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Orang	5	12 Bulan	Orang	29	12 Bulan	APBD
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	Orang	13	12 Bulan	Orang	33	12 Bulan	APBD
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Orang	12	12 Bulan	Orang	14	12 Bulan	APBD



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak							
	Akses ke layanan pendidikan	Orang	35	12 Bulan	Orang	35	12 Bulan	APBD
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	23	12 Bulan	Orang	2	12 Bulan	APBD
	Layanan rujukan	Orang	31	12 Bulan	Orang	64	12 Bulan	APBD
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Orang	1324	12 Bulan	Orang	1402	12 Bulan	APBD

4.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
1.	Penyediaan permakanaan	588	4.507		1.496.539.175	1.496.539.176	100%
2.	Penyediaan sandang	50	190				
3.	Penyediaan alat bantu	45	93				
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan	15	39				
5.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	29				



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	13	33				
7.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	12	14		28.954.250	28.954.251	100%
8.	Akses ke layanan pendidikan	35	35				
9	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	23	2		22.217.575	22.217.576	100%
10	Layanan rujukan	31	64				
B	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.324	1.402		64.000.800	64.000.800	100%

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1271	1271	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	453	453	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	18	18	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	530	530	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	50	50	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	46	46	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	21	21	0.00	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	105	105	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	32	32	0.00	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	830	830	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	461	461	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	18	18	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	188	188	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	87	87	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	56	56	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	0.00	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4269	4269	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	441	441	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	18	18	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	3731	3731	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	53	53	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	6	6	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	13	13	0.00	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	563	563	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	415	415	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	18	18	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	54	54	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	45	45	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	12	12	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	11	11	0.00	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANII :	Orang	1596	1596	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI:		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanaan	Orang	1075	1075	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	470	470	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	48	48	0.00	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2	2	0.00	100.00 %



4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-		
	Penyediaan permakanan		1.496.539.175	
	Penyediaan sandang		28.954.250	
	Pemberian Layanan Rujukan		22.217.575	
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		32.000.400	
	Penyediaan permakanan		24.138.400	
	Penyediaan dukungan psikososial		7.862.000	

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata 3	4
2	Strata 2	13
3	Strata 1 / Diploma 4	13
4	Diploma 3	6
5	Diploma 2	0
6	Diploma 1	0
7	SMA / MA / Sederajat	10
8	SMP / MTs / Sederajat	0
9	SD / MI / Sederajat	6
	TOTAL	52



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	INTERNAL		
		Kurangnya tenaga penanganan bencana di tiap kecamatan	Penambahan tenaga bencana
		Belum tersedianya gudang logistik penyimpanan bahan bantuan bencana yang representatif	Pembuatan gudang logistik
		Belum adanya alat pelindung diri bagi petugas penanganan bencana	Pengadaan APD
		Terbatasnya kuota layanan panti	Penambahan kuota layanan panti
		Terdapat pmks yang telah mendapat layanan rehabilitasi tetapi kambuh kembali dan rujukan panti belum tentu bisa masuk lagi	Memperbolehkan PMKS untuk masuk panti lagi
		Belum adanya anggaran home visit layanan dukungan psikososial penyiapan keluarga bagi PPKS yang akan pulang panti	Penganggaran untuk dana home visit
		Terbatasnya anggaran untuk penyediaan alat bantu	Penambahan anggaran



4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Program Pengelolaan Pendidikan	73.031.021.300
1	Pendidikan Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.911.778.800
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	812.172.500
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.027.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	499.550.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	42.045.750
...		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.994.537.350
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	378.188.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10.954.000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.163.200
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.141.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.109.455.000
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	2.480.460.800
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	124.519.800
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.445.553.100
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.841.990.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.053.044.500
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.046.129.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	79.995.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	117.440.100
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	69.740.100
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.632.200
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	211.656.600
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	0
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	576.469.400



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	38.824.400
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.512.603.700
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.302.001.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.053.635.000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.586.089.500
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.963.162.500
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	238.000.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.000.000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	209.715.700
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.000.000
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	0
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	0
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.000.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.000.000
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	31.497.183.800
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.497.183.800

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	KAB. TEGAL					104,038,368,666	96,249,589,882	92.51 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629				3,911,778,800	3,571,831,121	91.31 %
Angka Partisipasi Sekolah								
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	100,000,000	97,414,500	97.41 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	812,172,500	746,471,054	91.91 %	
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0.00 %	
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10,027,000	6,376,400	63.59 %	
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	499,550,000	487,476,200	97.58 %	
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %	
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0.00 %	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
Kekhususan PAUD								
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	42,045,750	41,059,300	97.65 %	
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	1,994,537,350	1,811,075,157	90.80 %	
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0.00 %	
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	378,188,000	316,866,710	83.79 %	
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0.00 %	
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	10,954,000	8,943,800	81.65 %	
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	39,163,200	34,267,000	87.50 %	
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	25,141,000	21,881,000	87.03 %	
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %	
	JUMLAH INDIKATOR					3,911,778,800	3,571,831,121	91.31 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)				29,240,955,300	25,667,188,347	87.78 %
Angka Partisipasi Sekolah								
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	2,480,460,800	2,397,742,965	96.67 %	
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	124,519,800	102,900,250	82.64 %	
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	5,445,553,100	5,303,641,040	97.39 %	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	2,841,990,000	2,616,797,920	92.08 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11,053,044,500	10,419,229,656	94.27 %
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2,046,129,000	1,814,069,008	88.66 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0.00 %
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	79,995,000	25,867,000	32.34 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	117,440,100	105,529,540	89.86 %
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	69,740,100	61,131,200	87.66 %
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	23,632,200	17,905,200	75.77 %
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	211,656,600	152,508,200	72.05 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	79,995,000	25,867,000	32.34 %
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	69,740,100	61,131,200	87.66 %
		5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	23,632,200	17,905,200	75.77 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0.00 %
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	211,656,000	152,508,200	72.05 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	2,046,129,000	1,814,069,008	88.66 %
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	117,440,100	105,529,540	89.86 %
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
Keamanan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	117,440,100	105,529,540	89.86 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	576,469,400	30,269,440	5.25 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	38,824,400	21,819,760	56.20 %
Kebinekaan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	117,440,100	105,529,540	89.86 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	576,469,400	30,269,440	5.25 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	38,824,400	21,819,760	56.20 %
Inklusifitas							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	117,440,100	105,529,540	89.86 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	576,469,400	30,269,440	5.25 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	38,824,400	21,819,760	56.20 %
	JUMLAH INDIKATOR				29,240,955,300	25,667,188,347	87.78 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647			13,060,319,400	12,393,322,947	94.89 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0.00 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,302,001,000	3,177,834,696	96.24 %
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1,053,635,000	1,039,564,358	98.66 %
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	100,000,000	77,975,050	77.98 %
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4,586,089,500	4,349,557,453	94.84 %
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2,963,162,500	2,880,161,400	97.20 %
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	238,000,000	212,302,236	89.20 %
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,000,000	8,471,368	84.71 %
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,421,964	94.22 %
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	209,715,700	150,804,160	71.91 %
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10,000,000	8,774,000	87.74 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	10,000,000	7,072,860	70.73 %
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,000,000	8,471,368	84.71 %
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10,000,000	8,774,000	87.74 %
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	209,715,700	150,804,160	71.91 %
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	10,000,000	7,072,860	70.73 %
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0.00 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	238,000,000	212,302,236	89.20 %
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,421,964	94.22 %
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
Keamanan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,421,964	94.22 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	10,000,000	9,050,260	90.50 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	10,000,000	9,560,071	95.60 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
Kebinekaan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,421,964	94.22 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	10,000,000	9,050,260	90.50 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10,000,000	9,560,071	95.60 %
Inklusifitas							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,000,000	9,421,964	94.22 %
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0.00 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	10,000,000	9,050,260	90.50 %
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				13,060,319,400	12,393,322,947	94.89 %
	4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			31,497,183,800	30,012,790,654	95.29 %
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	0	0	0.00 %
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	31,497,183,800	30,012,790,654	95.29 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				31,497,183,800	30,012,790,654	95.29 %
	5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842			0	0	0.00 %
Literasi							
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	0	0	0.00 %
Numerasi							
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	0	0	0.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				77,710,237,300	71,645,133,069	92.20 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				21,477,435,750	20,531,686,037	96%
	1	Literasi					
		1.			330,032,000	318,375,290	96.47 %
		2.			952,736,000	889,340,720	93.35 %
		3.			510,417,000	496,979,803	97.37 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4.			10,000,000	9,134,100	91.34 %
		5.			39,000,000	35,817,497	91.84 %
	2	Numerasi					
		1.			9,570,000	8,385,000	87.62 %
		2.			12,068,000	11,445,700	94.84 %
		3.			15,026,500	14,051,645	93.51 %
		4.			56,594,250	49,540,200	87.54 %
	3	Inklusifitas					
		1.			805,717,500	759,626,470	94.28 %
	4	Kebinekaan					
		1.			626,564,300	551,059,475	87.95 %
		2.			699,188,016	440,255,500	62.97 %
		3.			78,262,500	73,754,000	94.24 %
		4.			36,194,400	35,573,291	98.28 %
	5	Keamanan					
		1.			120,080,650	52,780,244	43.95 %
		2.			61,300,400	15,379,000	25.09 %
		3.			200,000,000	75,538,370	37.77 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4.			23,059,400	21,181,052	91.85 %
		5.			34,904,400	33,729,900	96.64 %
		6.			18,796,000	18,182,300	96.73 %
		7.			108,038,600	86,128,316	79.72 %
		8.			51,772,850	29,880,116	57.71 %
		9.			10,718,600	10,450,887	97.50 %
		10.			40,654,250	36,181,900	89.00 %
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD			4,747,537,750.00	4,510,147,530.00	95.00 %
	2	Pengadaan Mebel Sekolah SD			3,399,588,000.00	3,325,927,558.00	97.83 %
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD			603,140,000.00	516,534,800.00	85.64 %
	4	Pembangunan Laboratorium SMP			411,870,100.00	395,021,643.00	95.91 %
	5	Pembangunan Fasilitas Parkir SMP			298,590,000.00	292,768,050.00	98.05 %
	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP			334,165,000.00	330,435,352.00	98.88 %
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP			261,343,900.00	256,191,792.00	98.03 %
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP			681,761,500.00	628,137,408.00	92.13 %
	9	Pengadaan Mebel Sekolah SMP			2,256,485,000.00	2,139,270,292.00	94.81 %
	10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP			4,744,437,750.00	4,634,714,000.00	97.69 %
	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			507,693,200.00	494,703,650.00	97.44 %
	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			319,776,500.00	318,190,500.00	99.50 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	13	Pengadaan Mebel PAUD			49,909,850.00	47,710,040.00	95.59 %
	14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PAUD			99,362,800.00	98,142,200.00	98.77 %
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			1,898,264,000.00	1,710,832,721.00	90.13 %
	16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			15,200,500.00	13,327,880.00	87.68 %
	17	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			14,607,900.00	13,631,900.00	93.32 %
	18	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			247,213,250.00	240,062,250.00	97.11 %
	19	Pembangunan Ruang Kelas Baru			396,909,500.00	387,661,300.00	97.67 %
	20	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			123,885,850.00	116,841,391.00	94.31 %
	21	Pengadaan Mebel Sekolah			65,693,400.00	61,433,780.00	93.52 %

4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	200.000.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.536.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	403.842.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	569.000.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.210.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	184.800.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	400.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	330.000.000
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	70.000.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.051.632.200
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	155.000.000



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				9,210,274,200	8,690,441,791	94.36 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				9,210,274,200	8,690,441,791	94.36 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			9,210,274,200	8,690,441,791	94.36 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	200,000,000	191,272,512	95.64 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1,536,000,000	1,338,354,518	87.13 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	403,842,000	359,712,012	89.07 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	569,000,000	400,126,982	70.32 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	100,000,000	96,170,000	96.17 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1,210,000,000	1,193,745,367	98.66 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	184,800,000	160,970,000	87.10 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	400,000,000	389,404,800	97.35 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	330,000,000	315,522,100	95.61 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	70,000,000	65,081,100	92.97 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	4,051,632,200	4,030,159,900	99.47 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	155,000,000	149,922,500	96.72 %
	JUMLAH INDIKATOR				9,210,274,200	8,690,441,791	94.36 %
	JUMLAH PROGRAM						94.36 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					9,210,274,200	8,690,441,791	

4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				12,569,836,900	12,269,423,402	97.61 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3,992,939,000	3,852,100,196	96.47 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			3,992,939,000	3,852,100,196	96.47 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	248,934,500	228,992,898	91.99 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
		23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1,475,000,000	1,434,989,400	97.29 %
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0%
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	508,380,000	502,067,900	98.76 %
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,760,624,500	1,686,049,998	95.76 %
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				3,992,939,000	3,852,100,196	96.47 %
	JUMLAH PROGRAM				3,992,939,000	3,852,100,196	96.47 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				8,576,897,900	8,417,323,206	98.14 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,576,897,900	8,417,323,206	98.14 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang		0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1,927,103,250	1,887,418,198	97.94 %
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	100,000,000	98,530,161	98.53 %
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0%
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0%
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0%
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0%
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	50,000,000	0	0%
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0%
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0%
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0%
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	6,476,073,650	6,400,817,052	98.84 %
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang			
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	173,721,000	129,087,956	74.31 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,576,897,900	8,417,323,206	98.14 %
	JUMLAH PROGRAM				8,576,897,900	8,417,323,206	98.14 %



4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				100,000,000	99,182,500	99.18 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				100,000,000	99,182,500	99.18 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			20,000,000	19,182,500	95.91 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0 %
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0 %
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0 %
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	20,000,000	19,182,500	95.91 %
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0 %
	JUMLAH INDIKATOR				20,000,000	19,182,500	95.91 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			80,000,000	80,000,000	100.00 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	80,000,000	80,000,000	100.00 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				80,000,000	80,000,000	100.00 %
	JUMLAH PROGRAM				100,000,000	99,182,500	99.18 %



4.7.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.506.125
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.845.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.564.319.800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.680.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	201.933.350
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.775.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.810



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.999.925
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.982.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.250.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.100.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	10.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.310.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.880.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.995.000,00



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	298.195.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.980.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	45.898.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	298.195.000
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48.831.500
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengawasan Atas	991.662.540



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		589.827.775
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	566.805.775
		<i>Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>166.805.775</i>
		<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	<i>400.000.000</i>
		Kegiatan Investasi Kejadian Kebakaran	5.000.000
		<i>Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran</i>	<i>5.000.000</i>
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.022.000
		<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i>	<i>18.022.000</i>
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	31.327.500
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	31.327.500
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	246.009.750
		1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	64.442.500
		2 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	25.510.000



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
		3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	32.073.750
		4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	21.383.500
		5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	102.600.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		116.192.450
		1	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	41.725.000
		2	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota	74.467.450
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		714.958.975
		1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	59.930.100
		2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	165.940.000
		3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	483.677.375
		4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.411.500
		5	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	59.930.100



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				3,912,730,990	3,578,844,142	91.47 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				2,214,414,540	2,023,294,735	91.37 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			1,168,358,000	1,092,122,989	93.48 %
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	298,195,000	295,096,532	98.96 %
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	24,980,000	21,193,456	84.84 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	735,310,000	680,369,501	92.53 %
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1,200,000	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	62,775,000	51,398,600	81.88 %
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%
		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan	Kasus	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan				
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	0	0	0%
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	45,898,000	44,064,900	96.01 %
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,168,358,000	1,092,122,989	93.48 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			1,046,056,540	931,171,746	89.02 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	5,562,500	5,495,000	98.79 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	991,662,540	877,650,346	88.50 %
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	48,831,500	48,026,400	98.35 %
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%
		6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
		7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,046,056,540	931,171,746	89.02 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			0	0	0.00 %
		1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
		2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
		4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
		5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				2,214,414,540	2,023,294,735	91.37 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,108,488,675	1,012,379,271	91.33 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			31,327,500	29,063,250	92.77 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	31,327,500	29,063,250	92.77 %
	JUMLAH INDIKATOR				31,327,500	29,063,250	92.77 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			246,009,750	224,933,700	91.43 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	32,073,750	31,919,000	99.52 %
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	25,510,000	23,600,400	92.51 %
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	64,442,500	61,611,300	95.61 %
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	102,600,000	86,544,500	84.35 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	21,383,500	21,258,500	99.42 %
	JUMLAH INDIKATOR				246,009,750	224,933,700	91.43 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			714,958,975	646,137,761	90.37 %
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	59,930,100	55,768,100	93.06 %
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	165,940,000	142,033,920	85.59 %
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	483,677,375	443,014,341	91.59 %
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	5,411,500	5,321,400	98.34 %
	JUMLAH INDIKATOR				714,958,975	646,137,761	90.37 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			116,192,450	112,244,560	96.60 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	41,725,000	40,440,440	96.92 %
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%
		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	74,467,450	71,804,120	96.42 %
	JUMLAH INDIKATOR				116,192,450	112,244,560	96.60 %
	JUMLAH PROGRAM				1,108,488,675	1,012,379,271	91.33 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				589,827,775	543,170,136	92.09 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			566,805,775	520,518,786	91.83 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	166,805,775	166,805,775	98.11 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0%
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	400,000,000	356,871,462	89.22 %
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				566,805,775	520,518,786	91.83 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			0	0	0.00 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			5,000,000	4,965,000	99.30 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	5,000,000	4,965,000	99.30 %
	JUMLAH INDIKATOR				5,000,000	4,965,000	99.30 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			18,022,000	17,686,350	98.14 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	18,022,000	17,686,350	98.14 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				18,022,000	17,686,350	98.14 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			0	0	0.00 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	JUMLAH PROGRAM				589,827,775	543,170,136	92.09 %



4.7.6. Bidang Urusan Sosial

Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Penyediaan permakanaan	1.496.539.175
		Penyediaan sandang	28.954.250
		Pemberian Layanan Rujukan	22.217.575
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	32.000.400
		Penyediaan permakanaan	24.138.400
		Penyediaan dukungan psikososial	7.862.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. TEGAL				1,700,273,647	1,596,360,534	93.89 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,700,273,647	1,596,360,534	93.89 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,668,273,247	1,564,952,934	93.81 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	1,496,539,174	1,402,189,034	0 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	28,954,248	27,274,100	0 %



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	120,562,250	113,670,300	0%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	22,217,575	21,819,500	0 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,668,273,247	1,564,952,934	93.81 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			32,000,400	31,407,600	98.15 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	24,138,400	24,064,600	99.69 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7,862,000	7,343,000	93.40 %
	JUMLAH INDIKATOR				32,000,400	31,407,600	98.15 %
	JUMLAH PROGRAM				1,700,273,647	1,596,360,534	93.89 %



BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintahan.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Sedangkan secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan adalah dalam kerangka pelaksanaan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap perkembangan maupun perubahan yang terjadi demi peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hasil-hasil yang sudah dapat kita rasakan selama ini, merupakan *output* dari pada proses pembangunan. Semua hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, merupakan hasil kerja sama dari semua pihak yang tentunya melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga dari kerja sama tersebut merupakan kunci dan modal dasar kesuksesan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungan dari semua Pihak selama ini. Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan perangkat penyelenggara pemerintahan serta warga masyarakat Kabupaten Tegal pada proses perumusan dan formulasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera.

Dengan kerendahan hati kami senantiasa menerima kritik yang membangun, serta masukan yang konstruktif atas ketidaksempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini demi peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya.

Terimakasih.



LAMPIRAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
1	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini = 47.999. Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 59.062	81,2688361	%	
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar = 211.163. Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 261.960	80,6088716	%	
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan = 13.376. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah = 16.909	79,1058016	%	
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik = 868.	30,2966841	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		kondisi baik	Jumlah seluruh toilet = 2.865			
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik = 2.035. Jumlah ruang kelas = 6.457	31,516184	%	
2	Kesehatan	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N = 4. Jumlah ibu melahirkan tahun N = 18.509	0,0216111	%	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu = 14.291. Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama = 88.673	16,116518	%	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) = 18.465. Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 18.509	99,7622778	%	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
			kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun = 18.509. Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 18.509			
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun = 18.435. Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 18.435	100	%	
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 = 82.173. Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama = 82.173	100	%	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
			wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran = 227.055. Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama = 227.055			
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = 708.285. Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun = 708.285	100	%	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) = 147.370. Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) = 148.770	99,0589501	%	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun	96,3546643	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
			waktu satu tahun = 165.387. Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 171.644			
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = 33.198. Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. = 33.198	100	%	
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = 3.432. Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 3.643	94,2080703	%	
		Persentase pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan	96,7323574	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun = 32.445. Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 33.541			
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun = 29.559. Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama = 29.559	100	%	
3	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 799. Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti = 799	100	%	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 290. Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti = 290	100	%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	terpenuhi kebutuhan dasarnya = 3.215. Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti = 3.215			
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 56. Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti = 56	100	%	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 1.402. Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota = 1.402	100	%	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar = 4.360. Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota = 184.239	2,3664914	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N = 2. Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	66,6666667	%	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani = 105. Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan = 105	100	%	
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan = 14. Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi = 14	100	%	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 480. Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan = 480	100	%	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana =	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		dan evakuasi korban bencana	23.625. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 23.625			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap = 62. Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 87	71,2643678	%	
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N = 10. Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N = 10	100	%	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) = 0.85. Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N = 1	85	%	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N = 709. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N = 32.081	2,2100309	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N = 7. Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N = 7	100	%	
6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) = 0. Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha) = 8.968	-	%	Rekapitulasi hasil penilaian kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi untuk seluruh daerah irigasi Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah nihil.
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km) = 569.36. Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) = 854.54	66,6276593	%	
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum	75,9971755	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N = 1.335.642. Jumlah total penduduk kabupaten/kota = 1.757.489			
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik = 397.089. Jumlah rumah di kabupaten/kota = 413.598	96,008443	%	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha) = 1	-	%	Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengampu data/informasi berupa Persentase Luas Kawasan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
						Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) = 0. Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha) = 1	-	%	Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal tidak mengampu data/informasi berupa Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota.
		Persentase kepatuhan Persetujuan	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Bangunan Gedung kabupaten/Kota	yang digunakan sesuai peruntukannya = 406. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 406			
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan = 2. Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk = 2	100	%	
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 183. Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota = 588	31,122449	%	
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun = 66. Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun = 66	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
7	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan = 4. Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan = 33	12,1212121	%	
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1 = 170.057. Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1 = 137.009	24,1210431	%	
8	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota = 621. Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota = 1.800	34,5	%	
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 347. Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota = 396.164	0,08759	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi = 0. Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga) = 63	-	%	Tidak ada atlet daerah Kabupaten Tegal yang masuk pemusatan latihan daerah provinsi
		Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali = 17. Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional = 18	94,44444444	%	
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif = 63. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) = 406	15,5172414	%	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif = 50. Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang = 50	100	%	
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan = 477.513. Jumlah anak usia 0 – 17 tahun = 490.101	97,4315498	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak = 189.065. Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak = 462.307	40,8959847	%	
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan = 2. 2 dokumen = 2	100	%	
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik = 1.288.660. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 1.303.045	98,8960473	%	
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan = 51.130. Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan = 51.130	100	%	
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan = 740.601. Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan = 740.601	100	%	
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan = 25.988. Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan = 25.988	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
11	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun = 3. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N) = 5	60	%	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun = 35. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N) = 165	21,2121212	%	
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku = 197. Jumlah kerja sama desa yang ditangani = 281	70,1067616	%	
12	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota = 4.754.617.256.399. Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota = 2.790.545.995.174	70,3830456	%	
		Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota = 4.754.617.256.399. Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan = 3.500.000.000.000	135,8462073	%	
13	Koperasi, Usaha	Persentase pertumbuhan volume	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume	1,9484933	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
	Kecil dan Menengah	usaha koperasi	usaha koperasi tahun sebelumnya = 428.334.502.945. Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya = 420.147.948.495			
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) = 84.481. Σ Usaha mikro = 84.481	100	%	
14	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah = 53. Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota = 53	100	%	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 11. Jumlah Perusahaan = 2.558	0,4300235	%	
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
			Kabupaten/Kota = 7.157. Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota = 7.157			
15	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika = 29. Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah = 82	35,3658537	%	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 268. Jumlah Layanan Publik = 306	87,5816993	%	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 1.020.699. Jumlah penduduk = 1.188.242	85,8999261	%	
16	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah = 347.	46,5147453	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah = 746			
17	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi = 417. Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918) = 918	45,4248366	%	
18	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah = 10.375.525. Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah = 10.409.046	99,6779628	%	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting = 98.391. Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah = 98.391	100	%	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal = 0. Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah = 9	-	%	Pada surat pernyataan ini dibuat, seluruh dokumen Ranperkada yang telah disusun tersebut belum ditetapkan dalam

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
						Peraturan Bupati dikarenakan belum mendapatkan Persetujuan Subtansi dari Kementerian ATR/BPN. Data : DPUPR Kab Tegal
19	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTDaerah = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL) = 0.96$	0,96	Rasio	
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota = 0.372	0,372	Rasio	
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan = 3. Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata = 3	100	%	
20	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan = 17. Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara	70,8333333	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	langsung = 24			
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah = 154.018,7. Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota = 256.593,39	60,0244223	%	
21	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota = 18,12. Target jumlah cadangan pangan = 97,71	18,544673	%	
22	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = $((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100 = 56,71$	56,71	Nilai	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = $((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100 = 6$	6	Nilai	
23	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4 = 79,59$	79,59	%	
24	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota = 2,23. Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap	103,7209302	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
	Berencana		kabupaten/kota yang bersangkutan = 2,15			
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern = 165.147. Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun = 254.780	64,8194521	%	
		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota = 6,82. Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan = 7,72	88,3419689	%	
25	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) = 822.842.750.946. Realisasi investasi Tahun N = 4.754.617.256.399	17,3061827	%	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1 = 89. Jumlah wisatawan asing tahun N-1 = 19	368,4210526	%	
		Persentase peningkatan perjalanan	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun	0,1484593	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	N-1 = 1.109.693. Jumlah wisatawan tahun N-1 = 1.108.048			
26	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan = 81,7	81,7	%	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional = 294. Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah = 8.166	3,6002939	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 = 8.166. Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 = 7.647	6,7869753	%	
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri = 2.915.825.463.351. Total investasi seluruh sektor = 4.754.617.256.399	61,3261869	%	
27	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku = 6.274. Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota = 10.057	62,3844089	%	
28	Energi dan Sumber Daya Mineral					Bukan kewenangan kabupaten/kota
29	Transmigrasi					Bukan kewenangan kabupaten/kota
30	Kehutanan					Bukan kewenangan kabupaten/kota

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
31	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 = 533.032. Produksi tanaman pangan tahun N-1 = 495.717	7,5274804	%	
		Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 = 255.829,24. Produksi hortikultura tahun N-1 = 205.611,25	24,423756	%	
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 = 22.100,622. Produksi komoditas peternakan tahun N-1 = 21.593,953	2,3463467	%	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini = 165.59. Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis = 165.59	100	%	
32	Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT = 12,63	12,63	Kg / Kap / Tahun	
		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) = 5.235,89. Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton) = 5.106,021	102,5434482	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
33	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan = 17. Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden = 17	100	%	
34	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) = 963.168.510.397. Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = 3.285.079.126.837	29,319492	%	
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah = 731.692.733.050,02. Realisasi pendapatan daerah = 3.110.318.788.047,02	23,5246861	%	
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N = 1.977.810.035.696. Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N = 3.105.591.573.458	63,6854522	%	
		Persentase alokasi belanja infrastruktur	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik =	37,4791995	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
		pelayanan publik	1.044.917.232.752. Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa = 2.787.992.397.837			
35	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.808. Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2.716	66,5684831	%	
36	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5 = 2	2	Nilai	
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5 = 0	-	Nilai	Tahun 2025 penilaian Level Kapabilitas APIP belum terbit LHE dari BPKP sehingga belum ada nilai yang terbit dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait Penilaian

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
						Kapabilitas APiP
		Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5 = 2	2	Nilai	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1 = 754. Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1 = 794	94,9622166	%	
37	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa = 40	40	Poin	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan = 20,28	20,28	Poin	
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa = 20	20	Poin	
38	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu = Tepat	1	1. Tepat Waktu dan 2. Tidak Tepat Waktu	
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N = 1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang	14,2857143	%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Satuan	Keterangan
			dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N = 7			
39	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan public = 79,54	79,54	Nilai	
40	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah = 138. Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah =162	85,1851852	%	